



Misi Cipta Pendidikan Unggul

1. Dilakukan berbagai kegiatan atau kegiatan nyata yang dapat meningkatkan dan menyediakan sumber :
 - a. Peningkatan hasil belajar berbagai kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, perilaku bangsa bangsa, penguasaan kritis atau tinggikan suatu masalah
 - b. Penguasaan tidak mengabaikan kecerdasan yang wajar IPB University
2. Dilakukan pengembangan dan peningkatan kegiatan atau kegiatan nyata baik di dalam maupun di luar IPB University



PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah terhadap Pembiayaan Usaha Sektor Pertanian” adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2015

Niki Nurul Haq
NIM H44100007



@Mick opa mih IPB University

Hal Cipta (Hindung) Unmang-urindang

1. Dianggap mangrupis sabagian tina sababaraha karya seni nae tanpa munggaranmanan dan nyopetkeun sumber ;
2. Pergerakan hiji-saja arupa kagancangan seni/ditahan, awas/lebaran, peragaan karya ilmiah, penerbitan karya, penerbitan kritik, atau tujuan sanes masalah ;
3. Pergerakan tidak mangrupis kagancangan yang wujud IPB Unversality ;
4. Dianggap mangrupis karya seni nae kagancangan kalawan asal ilmiah karya tulis nae diaman kapanggih apanun tina IPB Unversity ;

ABSTRAK

NIKI NURUL HAQ. Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah Terhadap Pembiayaan Usaha Sektor Pertanian. Dibimbing oleh ADI HADIANTO

Usaha pertanian memiliki peran penting bagi pembangunan ekonomi nasional. Salah satu permasalahan utama dalam pengembangan usaha pertanian adalah rendahnya pembiayaan usaha pertanian. Pembiayaan syariah merupakan salah satu alternatif pembiayaan untuk usaha pertanian yang perlu dikembangkan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran BPRS Amanah Ummah terhadap pembiayaan usaha pertanian debitur dan menganalisis faktor kendala serta strategi dalam pembiayaan usaha pertanian di BPRS Amanah Ummah. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan BPRS Amanah Ummah berperan hanya sebatas menjadi penyedia dana pembiayaan dalam usaha pertanian yang dilakukan oleh debitur. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pembiayaan usaha pertanian ialah prosedur pembiayaan, sistem *marketing*, sumberdaya manusia di divisi *marketing*, persaingan dengan lembaga keuangan lain dan debitur gagal. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala pembiayaan usaha pertanian ialah dengan memperluas cakupan wilayah usaha pembiayaan pertanian, menyederhanakan prosedur pembiayaan dan pengaturan ulang tugas dan sumberdaya manusia divisi *marketing*, memberi pembinaan terhadap debitur melalui manajemen usaha dan pendampingan teknologi.

Kata kunci: pembiayaan syariah, SWOT, usaha pertanian



ABSTRACT

NIKI NURUL HAQ. The Role of Islamic Rural Bank Amanah Ummah to Finance the Agricultural Business. Supervised by ADI HADIANTO

Agricultural business have an important role for national economic development. Low financial support is one of the major problem in the development of agricultural business. Sharia finance is an alternative of financing which is needed to be developed. This research aims to determine the role of BPRS Amanah Ummah to debtor's agricultural business finance and to analyze the constraint factors and to formulate the strategy in agricultural business finance. The data were analyzed using SWOT method. The results showed that BPRS Amanah Ummah plays role as funder in agricultural business conducted by debtors. Constraint factors in financing agricultural business at BPRS Amanah Ummah are financing procedures, marketing systems, human resources in marketing division, competition with other financial institutions and non-performing debtor. The strategies that could be conducted to overcome the constraints in the financing agricultural business at BPRS Amanah Ummah are by expanding the coverage area of agricultural business financing, simplifying the financing procedures, conducting re-planning and job analysis of the human resources in marketing division, providing sufficient guide line and mentoring the debtors especially in the management of business and technology.

Keywords: agricultural business, sharia financing, SWOT

**PERAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AMANAH
UMMAH TERHADAP PEMBIAYAAN USAHA SEKTOR
PERTANIAN**

NIKI NURUL HAQ

Skripsi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi
pada
Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan

**DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2015**



Hik Cipta (Hindering) Unmang-undang

1. Dilakukan sebagai bagian dari penelitian, pengajaran, dan penyediaan sumber :

- a. Pengadaan hasil karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku, atau tujuan sosial lainnya
 - b. Penggunaan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University
2. Dilakukan menggunakan dan mempromosikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University

Judul : Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah
 terhadap Pembiayaan Usaha Sektor Pertanian
 Nama : Niki Nurul Haq
 NRP : H44100007

Disetujui Oleh



Adi Hadiano, SP, M.Si
 Pembimbing

Diketahui Oleh



Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT
 Ketua Departemen

Tanggal Lulus : 01 JUL 2015



@Hik cipta mitr IPB University

Hik Cipta (Hindone) Unmang-urandeng

1. Diambil mengutip sebagian atau seluruh karya kita tanpa mencantumkan dan menyediakan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pertukaran karya ilmiah, penyusunan kerja, atau tujuan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dianggap mengutamakan dan memperhatikan selangun atau seluruh karya kita dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah mengenai pembiayaan syariah usaha pertanian, dengan judul Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah terhadap Pembiayaan Usaha Sektor Pertanian.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orangtua tercinta Bapak Kusnaedi dan Ibu Isah Aisah serta adik penulis Abdul Haq yang tak lelah selalu mendoakan, memberi semangat dan kasih sayangnya kepada penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada

1. Bapak Adi Hadianto SP, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberi masukan dan saran kepada penulis selama masa penulisan.
2. Bapak Ir. Ujang Sehabudin M.Si selaku dosen penguji utama dan Ibu Fitria Dewi Raswatie SP, M.Si selaku dosen penguji perwakilan dari komisi pendidikan Departemen ESL.
3. Bapak Tridoyo Kusumastanto selaku dosen pembimbing akademik
4. Seluruh staf BPRS Amanah Ummah Kantor Pusat Leuwiliang dan nasabahnya atas kesempatan dan informasi yang diberikan.
5. Teh Titi dan Fikri yang membantu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman satu bimbingan (Fikri, Shiraz, Esya, Ayu, Atika, Entin, Cui, Rita, Ulul), ESL angkatan 47, sahabat dan teman asrama (Febri, Eko P, Laras, Rizki, Usi, Wahyuning, Lisna, Hani, Sundari), teman-teman Wisma Novita dan Arini (Syinta, Rere, Kunti, Ka Vera, Ka Dini, Ka Fite, Indi, Ulfa, Nia dan Laras) serta teman-teman di UKM LISES Gentra Kaheman IPB 2011-2014.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Juni 2015

Niki Nurul Haq

**Hak Cipta Penerbitan/ Unsur-unsur**

1. Diambil mengutip sebagian atau seluruh karya yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan :

- a. Pengutipan harus menyebutkan sumbernya, asal-usulnya, penerbitan karya ilmiah, jenis-jenis laporan, jenis-jenis karya atau tujuan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dianggap mengutipkan dan menyalinnya sebagian atau seluruh karya tulis yang dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

I.	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Perumusan Masalah	6
	1.3 Tujuan Penelitian	8
	1.4 Manfaat Penelitian.....	9
II.	TINJAUAN PUSTAKA.....	11
	2.1 Usahatani	11
	2.2 Lembaga Keuangan Mikro	11
	2.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	11
	2.4 Pembiayaan Syariah	13
	2.5 Pembiayaan Syariah di Sektor Pertanian	14
	2.6 Penelitian Terdahulu	15
III.	KERANGKA PEMIKIRAN.....	25
	3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	25
	3.1.1 Analisis Deskriptif	25
	3.1.2 Analisis Lingkungan	25
	3.1.3 Analisis Matriks SWOT	28
	3.2 Kerangka Pemikiran Operasional.....	29
IV.	METODOLOGI PENELITIAN.....	31
	4.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	31
	4.2 Jenis dan Sumber Data.....	31
	4.3 Metode Pengumpulan Data.....	31
	4.4 Metode Analisis dan Pengolahan Data.....	31
	4.5 Analisis SWOT.....	32
	4.5.1 Identifikasi Peran BPRS Amanah Ummah terhadap Pembiayaan Sektor Pertanian.....	32

4.5.2 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal.....	33
4.5.3 Matriks SWOT	33
V. GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	35
5.1 Gambaran Umum Kabupaten Bogor	35
5.2 Gambaran Umum Kecamatan Leuwiliang.....	35
5.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis	35
5.2.2 Kondisi Perekonomian	36
5.3 Gambaran Umum BPRS Amanah Ummah	37
5.3.1 Sejarah Singkat BPRS Amanah Ummah	37
5.3.2 Struktur Organisasi BPRS Amanah Ummah	38
5.3.3 Produk Pembiayaan BPRS Amanah Ummah	42
5.3.4 Prosedur Pembiayaan BPRS Amanah Ummah.....	43
VI. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
6.1 Peran BPRS Amanah Ummah Terhadap Pembiayaan Usaha Sektor Pertanian	49
6.2 Faktor yang Menjadi Kendala BPRS Amanah Ummah dalam Penyaluran Kredit Usaha Sektor Pertanian.....	57
6.2.1 Tahapan Masukan (Input Stage).....	57
6.2.2 Identifikasi Faktor Internal	58
6.2.3 Identifikasi Faktor Eksternal	58
6.3 Strategi untuk Mengatasi Kendala dalam penyaluran Kredit Usaha Sektor Pertanian	59
VII. SIMPULAN DAN SARAN	69
7.1 Simpulan.....	69
7.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	77
RIWAYAT HIDUP.....	89

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1	Presentase Kontribusi Sektor terhadap Produk Domestik Bruto 2014...	1
2	Perkembangan Jumlah BPRS di Indonesia Tahun 2008 - 2014.....	4
3	Jumlah BPRS Berdasar Provinsi di Indonesia Tahun 2008 – 2014...	5
4	Sebaran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Barat	6
5	Sebaran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kabupaten Bogor	7
6	Pola Pembiayaan Usahatani	16
7	Tabel Penelitian Terdahulu	17
8	Matriks Analisis SWOT	29
9	Matriks Metode dan Analisis Data	32
10	Matriks Analisis SWOT	34
11	Kegiatan Perekonomian berdasarkan Mata Pencaharian Kecamatan Leuwiliang	37
12	Rincian Sektor dan Nominal Pembiayaan per Sektor di BPRS Amanah Ummah Tahun 2013	53
13	Rincian Jumlah Nasabah Pembiayaan Sektor Pertanian BPRS Amanah Ummah 2007 – 2013	54
14	Faktor Internal BPRS Amanah Ummah	58
15	Faktor Eksternal BPRS Amanah Ummah	59
16	Matriks Analisis SWOT	60

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1	Kerangka Operasional Penelitian	30
2	Jumlah Dana Pihak Ketiga BPRS Amanah Ummah Tahun 2007-2013	49
3	Laba Bersih BPRS Amanah Ummah Tahun 2007 – 2013	50
4	Jumlah Nasabah Pembiayaan BPRS Amanah Ummah Tahun 2007 - 2013	51
5	Jumlah Nominal Usaha Pembiayaan di BPRS Amanah Ummah Tahun 2007 – 2013	52

6	Jumlah Nominal Pembiayaan Sektor Pertanian BPRS Amanah Ummah 2007- 2013	54
7	Jenis Usaha Nasabah Pembiayaan Sektor Pertanian BPRS Amanah Ummah Tahun 2013	55
8	Jumlah Pembiayaan Usaha Sektor Pertanian BPRS Amanah Ummah Tahun 2013	56
9	Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan Sektor Pertanian	57

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1	Kuesioner Nasabah Pembiayaan Sektor Pertanian BPRS Amanah Ummah	79
2	Kuesioner BPRS Amanah Ummah	82
3	Jumlah Dana Pihak Ketiga BPRS Amanah Ummah Tahun 2007 -2013	87
4	Laba Bersih BPRS Amanah Ummah Tahun 2007 – 2013	87
5	Jumlah Nasabah Usaha Pembiayaan BPRS Amanah Ummah Tahun 2007 – 2013	87
6	Tabel Jumlah Nominal Usaha Pembiayaan BPRS Amanah Ummah Tahun 2007 – 2013	88
7	Tabel Jumlah Nominal Pembiayaan Sektor Pertanian BPRS Amanah Ummah Tahun 2007 – 2013	88

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar mata pencaharian penduduknya berada di sektor pertanian sehingga sektor pertanian menjadi salah satu sektor terpenting bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (2015), sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 35% sehingga pertanian menjadi sektor yang strategis di Indonesia. Meski mampu menyerap banyak tenaga kerja, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja dan potensi yang ada. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pada tahun 2014, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB menempati urutan ketiga dari keseluruhan PDB yang diterima setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Tabel 1 Presentase Kontribusi Sektor Perekonomian terhadap Produk Domestik Bruto Tahun 2014

Sektor	Kontribusi (%)
1. Industri Pengolahan	23.71
2. Perdagangan, hotel dan restoran	14.60
3. Pertanian	14.33
4. Jasa	10.98
5. Pertambangan dan penggalian	10.49
6. Bangunan	10.05
7. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	7.65
8. Pengangkutan dan komunikasi	7.39
9. Listrik, gas dan air bersih	0.80
Total	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Usaha di sektor pertanian dinilai memiliki resiko yang cukup tinggi karena pada sektor ini hasil produk dan komoditi bersifat *bulky* dan *voluminous* serta sangat bergantung pada kondisi alam. Selain itu usaha di sektor pertanian terutama pada *on-farm* memiliki *grace periode* yaitu rentang waktu antara masa tanam dengan masa panen

(Anggriawan, 2010). Tingginya resiko yang dimiliki oleh usaha sektor pertanian ini menimbulkan permasalahan lain yaitu sulitnya pelaku usahatani untuk mengakses modal. Sulitnya akses terhadap modal menyebabkan pelaku usahatani kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Kesulitan di sektor pertanian ini seharusnya tidak hanya ditanggung oleh petani saja tetapi juga harus ditangani oleh pihak lainnya karena masalah pertanian berkaitan dengan kelangsungan pangan masyarakat luas. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membenahi sistem permodalan yang mendukung bagi usaha sektor pertanian. Banyak sistem yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga keuangan untuk pengembangan usaha diantaranya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Menengah dan Kecil (KUMK), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), Kredit Usaha Pembibitan Sapi dan Kredit Revitalisasi Perkebunan. Program-program tersebut sudah banyak dijalankan tetapi masih belum memberikan hasil yang signifikan terhadap pengembangan usaha sektor pertanian. Salah satu alasan mengapa belum memberikan hasil yang signifikan adalah karena para pelaku usahatani kesulitan mengakses lembaga-lembaga yang mengelola sistem permodalan tersebut.

Kesulitan pelaku usahatani ini menjadi salah satu kelemahan dari program yang telah dilaksanakan sehingga harus dievaluasi dan dicari alternatif lain yang sesuai untuk mengatasi kelemahan dari program yang dilaksanakan sehingga memberi hasil yang positif bagi pelaku usahatani. Untuk mengatasi kelemahan tersebut ada berbagai macam cara alternatif yang dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan menerapkan pembiayaan dengan sistem berbasis syariah.

Sistem pembiayaan berbasis syariah merupakan kegiatan penyediaan uang dan barang dari pihak bank atau lembaga keuangan terhadap nasabah sesuai dengan kesepakatan yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil berdasar prinsip syariah yaitu prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah*. Tujuan dari sistem pembiayaan yang menerapkan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta sistem terkait (Soemitra, 2009).

Sistem pembiayaan berbasis syariah sangat fleksibel terutama pada pembagian keuntungan maupun kerugian (*profit and loss sharing*) dalam usaha (Sutawi, 2008). Penggunaan prinsip syariah di Indonesia sebenarnya bukan hal baru bagi petani karena ada sistem *maro* dan *mertelu* yang prinsipnya hampir sama dengan prinsip syariah yang selama ini telah dilakukan secara turun temurun (Anjani, 2013). Penerapan sistem syariah

pada lembaga keuangan sampai saat ini sudah diterapkan di berbagai macam bentuk oleh lembaga keuangan yang ada di Indonesia termasuk di Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Berdasar Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Berdasarkan sistem yang digunakan, lembaga keuangan mikro dibagi menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LMKS). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LMKS) merupakan lembaga keuangan mikro yang menerapkan sistem syariah dalam pelaksanaan kegiatannya. LKM sendiri dibagi menjadi dua yaitu LKM berbentuk bank dan LKM non bank . LMKs yang termasuk LMKs berbentuk bank adalah BRI Unit dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan LMKs yang berbentuk non bank seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan Koperasi Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran (Soemitra, 2009)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia terus mengalami perkembangan baik dari segi jumlah maupun pelayanan dengan tujuan mempermudah akses bagi pelaku usaha untuk mengakses sumber modal. Mudah-mudahan akses terhadap modal membuat pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usaha yang merupakan nasabah pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Berdasarkan data pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah BPRS dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah BPRS di Indonesia dikarenakan beberapa faktor antara lain semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan sistem syariah, kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap BPRS dan pemberitaan media yang positif mengenai syariah semakin meluas sehingga masyarakat mengetahui dan mempercayainya. Jumlah BPRS yang terus meningkat juga menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang membutuhkan lembaga keuangan berbasis syariah.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (2015a) menunjukkan perkembangan jumlah jaringan perbankan syariah yang ada di Indonesia termasuk perkembangan jumlah BPRS. Jumlah BPRS di Indonesia mencapai 163 bank dengan jumlah kantor sebanyak 439 kantor (Tabel 2).



Tabel 2 Perkembangan Jumlah BPRS di Indonesia Tahun 2008 - 2014

Jaringan Kantor Perbankan Syariah							
Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Bank Umum Syariah (BUS)							
a. Jumlah bank	5	6	11	11	11	11	12
b. Jumlah kantor	581	711	1215	1401	1745	1998	2151
Unit Usaha Syariah (UUS)							
a. Jumlah Bank Konvensional yang memiliki UUS	27	25	23	24	24	23	22
b. Jumlah kantor	241	287	262	336	517	590	320
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)							
a. Jumlah bank	131	138	150	155	158	163	163
b. Jumlah kantor	202	225	286	364	401	402	439
Total Kantor	1024	1223	1763	2101	2663	2990	2910

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2015a

Pembiayaan berdasar prinsip syariah yang dilakukan di BPRS bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pada usaha sektor pertanian. Perkembangan jumlah BPRS seharusnya diikuti dengan peningkatan dalam pelayanan dan kualitas BPRS yang dapat dilihat dari efektivitas penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS. Apabila efektivitas pembiayaan dapat tercapai maka akan memberikan dampak positif bagi BPRS dan nasabahnya. Dampak positif tercapainya efektivitas bagi BPRS diantaranya adalah perputaran modal terjamin lancar dan efektif karena pengembalian pembiayaan dari nasabah berjalan dengan lancar, sedangkan dampak positif bagi nasabah adalah peningkatan skala usaha dan aset sehingga mampu mengembangkan usaha dan pendapatan meningkat sehingga tingkat kesejahteraan nasabah pun turut meningkat.

Laju perkembangan BPRS berbeda-beda di tiap daerah. Laju perkembangan jumlah BPRS di beberapa provinsi yang ada di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Jumlah BPRS Berdasar Provinsi di Indonesia Tahun 2008 - 2014

Provinsi	Tahun						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. NAD	6	7	10	10	10	10	10
2. Lampung	7	7	5	6	7	8	8
3. Sulawesi Selatan	7	7	7	7	7	8	8
4. Banten	8	8	8	8	8	8	8
5. DKI Jakarta	1	2	2	2	2	2	2
6. Jawa Barat	28	27	28	27	27	28	30
7. Jawa Tengah	15	19	21	21	24	25	25
8. DIY	9	9	10	11	11	11	11
9. Jawa Timur	23	25	29	30	31	31	31
10. Provinsi lain	28	28	28	29	30	30	30
Total	131	138	150	155	158	158	163

Sumber : Bank Indonesia, 2015

Dari Tabel 3 dapat diketahui BPRS terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur yang kemudian diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah. Laju pertumbuhan jumlah BPRS menunjukkan bahwa BPRS memiliki potensi untuk lebih dikembangkan agar menjangkau semua lapisan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di wilayah yang belum terjangkau oleh bank umum. Pada umumnya masyarakat tersebut berada di wilayah pedesaan atau pinggir kota yang jauh dari pusat keramaian dan wilayah bisnis. Adanya BPRS di wilayah tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan usaha sektor riil yang ada di wilayah tersebut.

Meningkatnya jumlah BPRS seharusnya semakin terbuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Di Provinsi Jawa Barat sendiri jumlah BPRS mencapai 30 unit tetapi belum merata penyebarannya. Jumlah BPRS di Provinsi Jawa Barat akan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Sebaran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Barat

Kota/Kabupaten	Jumlah BPRS
1. Kabupaten Bekasi	3
2. Kabupaten Bogor	4
3. Kota Depok	4
4. Kabupaten Bandung	5
5. Kota Cimahi	3
6. Kabupaten Garut	2
7. Kota Tasikmalaya	2
8. Kabupaten Tasikmalaya	1
9. Kabupaten Cianjur	1
10. Kabupaten Cirebon	1
11. Kota Bekasi	3
12. Kabupaten Subang	1
Total	30

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2015b

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa di Jawa Barat wilayah Kabupaten Bandung yang paling banyak memiliki BPRS. Kabupaten Bogor sendiri memiliki 4 BPRS yang tersebar di seluruh wilayahnya. Kondisi pertanian di Kabupaten Bogor sendiri masih memiliki potensi untuk berkembang terutama di wilayah Leuwiliang, Jasinga dan sekitarnya. Alasan inilah yang membuat salah satu BPRS yang ada di Kabupaten Bogor yaitu BPRS Amanah Ummah menyediakan pembiayaan untuk pengembangan usaha sektor pertanian. Pembiayaan untuk sektor pertanian yang berdasar prinsip syariah yang dilakukan oleh BPRS diharapkan dapat memberikan peranan yang lebih besar bagi sektor pertanian khususnya di wilayah Bogor dan sekitarnya.

1.2 Rumusan Masalah

Perkembangan peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai alternatif pembiayaan usaha mikro khususnya usaha mikro di sektor pertanian sangat penting. Pada kenyataannya masih banyak BPRS yang masih enggan untuk memberikan pembiayaan untuk sektor pertanian. Kemudahan dalam mengakses sumber modal atau pembiayaan seharusnya menjadi salah satu pemicu bagi pelaku usahatani untuk lebih giat mengelola dan mengembangkan usahanya.

Kabupaten Bogor memiliki empat BPRS yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Sebaran BPRS Kabupaten Bogor akan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Sebaran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kabupaten Bogor

Lokasi	BPRS
1. Kecamatan Dramaga	BPRS Bina Rahmah
2. Kecamatan Ciomas	BPRS Rifa'tul Ummah
3. Kecamatan Leuwiliang	BPRS Amanah Ummah
4. Kecamatan Parung	BPRS Insan Cita Artha Jaya

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2015b

Kabupaten Bogor memiliki potensi pertanian yang cukup tinggi terutama di wilayah Bogor Barat. Besarnya potensi pertanian di wilayah Bogor Barat belum sepenuhnya dimanfaatkan sehingga masih memiliki kemungkinan untuk berkembang. Potensi pertanian yang ada di wilayah Bogor Barat meliputi perkebunan, sawah, perikanan dan peternakan.

BPRS Amanah Ummah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan usaha di sektor pertanian di Kabupaten Bogor. BPRS Amanah Ummah menyediakan pembiayaan untuk sektor pertanian karena melihat sektor pertanian di wilayah Bogor khususnya Bogor Barat masih memiliki potensi untuk berkembang dan melihat prospek yang cukup baik pada pembiayaan usaha sektor pertanian karena minimnya lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan di sektor pertanian.

Pembiayaan yang ada di BPRS Amanah Ummah meliputi berbagai sektor yaitu sektor perdagangan, jasa, industri, usaha pertanian dalam arti luas dan lain-lain. Selain itu juga BPRS Amanah Ummah berperan dalam aktivitas lainnya seperti tabungan, gadai emas dan lain-lain. Untuk pembiayaan usaha sistem pembiayaan yang digunakan oleh BPRS Amanah Ummah yaitu sistem pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, *qard*, *ijarah* dan *qard rahn* (BPRS Amanah Ummah, 2013).

Debitur yang usahanya mendapat pembiayaan dari BPRS Amanah Ummah akan mendapat pembinaan dari pihak BPRS Amanah Ummah. Pembinaan yang dilakukan dengan tujuan agar pembiayaan yang diberikan dimanfaatkan secara maksimal untuk mengembangkan usahanya. Upaya pembinaan terhadap debitur sudah dilaksanakan namun belum memberikan hasil yang memuaskan. Sistem pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS Amanah Ummah hampir sama untuk semua sektor, hanya berbeda dalam akadnya. Meski dana untuk usaha sektor pertanian sudah tersedia dan sudah ditetapkan sistem untuk pembiayaan usaha sektor pertanian tetapi masih sedikit debitur yang mengajukan dan diterima permohonan pengajuan pembiayaannya. Permasalahan inilah yang menjadi kendala dalam pemberian pembiayaan usaha sektor pertanian di BPRS Amanah Ummah (BPRS Amanah Ummah, 2014).

Permasalahan ini yang perlu dicarikan solusinya oleh manajemen BPRS Amanah Ummah dalam upaya mengembangkan penyaluran kredit untuk pembiayaan usaha di sektor pertanian di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan yang ingin dijawab dari penelitian ini ialah;

1. Bagaimana peran BPRS Amanah Ummah dalam pembiayaan usaha di sektor pertanian?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala BPRS Amanah Ummah dalam penyaluran kredit usaha pertanian dan strategi apa yang harus dilakukan dalam upaya mengatasi kendala yang terjadi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis peranan BPRS dalam pembiayaan usaha sektor pertanian khususnya Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Ada pun tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis peran BPRS Amanah Ummah dalam pembiayaan usaha sektor pertanian
2. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala bagi BPRS Amanah Ummah dalam penyaluran kredit usaha pertanian dan strategi yang dapat dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah dalam mengatasi kendala yang terjadi .

1.4 Ruang Lingkup

Ada pun ruang lingkup dari penelitian ini adalah ;

1. Penelitian ini dilaksanakan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah Leuwiliang Bogor,
2. Pembahasan fokus pada peran BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor dalam pembiayaan usaha sektor pertanian,
3. Responden penelitian ini adalah nasabah pembiayaan sektor pertanian yang berada di Kabupaten Bogor dan manajemen BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor.



@Hik cipta milik IPB University

Hik Cipta (Hindone) Unmang-urandeng

1. Diambil mengutip sebagian atau seluruh karya yang telah dipublikasikan dan dipersebarluaskan kembali ;
- a. Pengutipan harus untuk tujuan pendidikan, penelitian, persidangan, pembelaan publikasi, pemrosesan berita atau tujuan untuk masalah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University;
2. Dianggap mengutamakan dan memperhatikan selangun akan seluruh karya tulis yang dipublikasikan apapun tempat dan IPB University.



Hal Cipta (Inventor) Unmang-undang

1. Diambil sebagai bagian dari seluruh karya yang telah diciptakan, dan dipersebarluaskan :

- a. Perguruan tinggi atau lembaga pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, penerbitan karya ilmiah, penerbitan laporan, penerbitan kritik atau tanggapan suatu masalah
 - b. Penyelidikan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dianggap mengutamakan dan memperhatikan selangun akan seluruh karya tulis yang dipublikasikan apapun bentuknya oleh IPB University.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usahatani

Usahatani menurut Soekartawi (1986) adalah organisasi yang pelaksanaannya berdiri sendiri dan sengaja diusahakan oleh seseorang atau sekumpulan orang, segolongan sosial baik terkait biologis, politis maupun territorial sebagai pengelolanya. Usahatani merupakan proses menggunakan sumberdaya secara efisien dan efektif pada suatu usaha pertanian agar diperoleh hasil yang maksimal (Shinta, 2011). Tujuan usahatani dapat dikategorikan menjadi dua yaitu memaksimalkan keuntungan dan meminimumkan pengeluaran.

2.2 Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro menurut Rudjito (2003) adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan penyediaan keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.

Menurut UU No 1 Tahun 2013 Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Lembaga keuangan mikro di Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu lembaga keuangan mikro berbentuk bank dan lembaga keuangan mikro berbentuk non bank. Lembaga keuangan mikro berbentuk bank ialah berupa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit, sedangkan lembaga keuangan berbentuk non bank berbentuk seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Koperasi Swadaya Masyarakat (KSM) dan LDKP.

2.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Definisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam UU No.21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum dari BPRS adalah berupa perseroan terbatas (PT) dan hanya dapat didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI), pemerintah daerah (Pemda) atau kemitraan antara warga negara Indonesia (WNI) atau badan hukum dengan pemerintah daerah.

Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Fungsi BPRS yang utama adalah sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Dalam UU No.21 Tahun 2008 pasal 21, usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi ;

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
 - a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 - b. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan akad *mudarah* akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat
 - a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *Mudarah* atau *Musyarakah*
 - b. Pembiayaan berdasarkan Akad *Murahah*, *Salam*, *Istishna*
 - c. Pembiayaan berdasarkan Akad *Qardh*
 - d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak dan atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *Ijarah* atau sewa-beli dalam bentuk *Ijarah Mumtaha Bittamlik* (IMBT) dan
 - e. Pengambilalihan hutang berdasar akad *Hawalah*
3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadiah* atau investasi berdasar akad *mudarah* dan/atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

4. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional dan UUS ;dan
5. Menyediakan produk, atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Salah satu kegiatan utama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah kegiatan pembiayaan. Pembiayaan berdasar prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan. Pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah bermacam-macam jenisnya dan untuk bermacam sektor pula, salah satunya pembiayaan usaha sektor pertanian.

2.4 Pembiayaan Syariah

Menurut UU No 21 Tahun 2008 pasal 1, definisi pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* atau *Musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Mumtahia bittamlik*;
3. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*;
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*, dan
5. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa berdasar persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu pinjaman tertentu dengan imbalan *Ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Definisi prinsip syariah menurut undang-undang perbankan UU No.10 Tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.5 Pembiayaan Syariah di Sektor Pertanian

Perkembangan pembiayaan syariah di bank umum syariah maupun bank pembiayaan rakyat syariah dimulai sejak berdiri bank syariah pertama di Indonesia pada 1 Mei 1992 yaitu Bank Muamalat Indonesia. Awalnya sistem syariah kurang mendapat respon dari lembaga keuangan yang ada di Indonesia karena dianggap tidak memberikan keuntungan seperti sistem konvensional. Pembiayaan syariah ini bertujuan mempermudah akses pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan untuk dapat mengembangkan usaha sehingga hasil yang diperoleh lebih meningkat tetapi tidak lepas dari cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Ashari dan Saptana (2005) prospek pembiayaan syariah di sektor pertanian dilandasi oleh beberapa hal yaitu ;

1. Karakteristik pembiayaan syariah sesuai dengan kondisi bisnis pertanian
2. Skim pembiayaan syariah sudah dipraktekan secara luas oleh petani di Indonesia. Secara budaya petani Indonesia sudah mengenal pembiayaan yang sistemnya mirip dengan pembiayaan syariah seperti *maro* dan *mertelu* (sistem yang sejalan dengan prinsip *mudharabah*).
3. Luasnya cakupan usaha di sektor pertanian. Semua subsistem mulai dari subsistem hulu, budidaya, hilir hingga pemasaran hasil pertanian memungkinkan untuk menggunakan pembiayaan dengan sistem syariah.
4. Produk pembiayaan syariah yang cukup beragam. Luasnya cakupan usaha dan komoditas pertanian telah diantisipasi dengan berbagai macam produk pembiayaan syariah sehingga nasabah dapat memilih produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan usaha mereka.
5. Tingkat kepatuhan dan karakteristik petani. Pertanian banyak dilakukan oleh petani kecil dipedesaan yang biasanya taat dalam beragama. Dengan adanya skim

pembiayaan yang sesuai dengan ajaran agama diharapkan secara emosional dapat mempermudah daam menerima sistem pembiayaan syariah.

6. Komitmen bank syariah untuk usaha kecil dan menengah.
7. Usaha sektor pertanian yang merupakan bisnis riil sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah yang menitikberatkan pada pembiayaan sektor riil. Pem
8. Usaha sektor pertanian yang merupakan bisnis riil, sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah yang menitikberatkan pembiayaan pada sektor riil dan melarang pembiayaan pada sektor yang spekulatif.

Melihat potensi usaha sektor pertanian yang dimiliki oleh Indonesia sudah sepantasnya apabila sistem pembiayaan syariah dikembangkan lebih jauh dan lebih baik. Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dari Kementerian Pertanian membentuk beberapa sistem pola pembiayaan syariah yang dapat menjadi bahan acuan bagi pelaku usahatani untuk berbagai sektor yang akan disajikan pada Tabel 6.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pembiayaan syariah pada sektor pertanian telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain, Kurnia (2009), Anggriawan (2010), Apriliana (2010), Anjani (2013), Beik dan Aprianti (2013), Nuruddarajat (2013) dan Tsabita (2013). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan untuk sektor agribisnis masih sangat minim akan tetapi jika dilihat dari tingkat efektivitasnya pembiayaan syariah ini dapat dikatakan efektif. Tinjauan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1	Nama: Fehmi Kurnia Tahun: 2009 Judul: Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan syariah pada sektor agribisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan menganalisis skim pembiayaan syariah untuk sektor agribisnis 2. Efektivitas penyaluran pembiayaan syariah untuk sektor agribisnis 3. Menganalisis faktor yang mempengaruhi dalam realisasi pembiayaan syariah dan pemanfaatan pembiayaan untuk sektor pertanian pada KBMT Tadbiirul Ummah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interview langsung dengan responden dan pihak KBMT Tadbiirul Ummah 2. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis Regresi Linear Berganda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KBMT Tadbiirul Ummah mampu mencapai efektivitas pembiayaan sebesar 81% berdasar nominal pembiayaan dan 88% berdasar mitra yang dimiliki sehingga penyaluran pembiayaan yang dilakukan KBMT Tadbiirul Ummah dapat dikatakan efektif 2. Faktor yang signifikan mempengaruhi realisasi pembiayaan untuk sektor agribisnis adalah bagi hasil. Sedangkan pada pemanfaatannya pembiayaan syariah mampu dimanfaatkan sebesar 81.8% untuk pembiayaan usaha dan 18.2% untuk konsumsi dan keperluan lainnya.
2	Nama: Aries Anggriawan Tahun: 2010 Judul: Analisis efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pembiayaan syariah pada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis efektivitas penyaluran pembiayaan sistem syariah untuk sektor agribisnis pad BPRS Amanah Ummah 2. Menganalisis pengaruh pembiayaan sistem syariah 	Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas penyaluran pembiayaan BPRS Amanah Ummah dapat dikatakan telah efektif dilihat dari kriteria bank maupun keragaan pembiayaan syariah yang terjadi kepada

sektor agribisnis (Studi kasus: PT BPRS Amanah Ummah)	terhadap kinerja usaha di sektor agribisnis (<i>on-farm</i> maupun <i>off-farm</i>) pada BPRS Amanah Ummah 3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam realisasi pembiayaan sistem syariah untuk sektor agribisnis pada BPRS Amanah Ummah	nasabah. 2. Pembiayaan Murabahah memberikan pengaruh terhadap perbedaan rata-rata keuntungan usaha pertahun pada sektor <i>on-farm</i> dan <i>off-farm</i> sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan <i>Murabahah</i> terbukti dari rata-rata hitung yang mengalami peningkatan. 3. Berdasar uji statistik-t variabel bebas yang berpengaruh signifikan pada taraf nyata 5% realisasi pembiayaan syariah untuk sektor agribisnis pada BPRS Amanah Ummah adalah variabel nisbah bagi hasil/margin, komposisi modal usaha, pengetahuan mengenai akad pembiayaan, dan sektor usaha yang dimiliki oleh nasabah.
3 Nama: Tursina Apriliana Tahun: 2010 Judul: Analisis strategi bauran promosi produk pembiayaan PT BPRS Amanah Ummah cabang	1. Mengidentifikasi bentuk bauran promosi produk pembiayaan BPRS Amanah Ummah cabang Leuwiliang 2. Menyusun alternatif bauran promosi produk pembiayaan	Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan AHP (Analytical Hierarchy Process) 1. Bentuk bauran promosi di BPRS Amanah Ummah cabang Leuwiliang Bogor terdiri dari periklanan, penjualan penjual, promosi penjualan, pemasaran langsung, publisitas, dan

Leuwiliang Bogor	<p>BPRS Amanah Ummah cabang Leuwiliang</p> <p>3. Merumuskan prioritas strategi bauran promosi produk pembiayaan dengan Proses Hierarki Analitik (PHA)</p>	<p>interaktif media.</p> <p>2. Penyusunan hierarki terdiri dari fokus, aktor, tujuan dan alternatif. Fokus pada strategi bauran promosi. Faktor yang mempengaruhi bauran promosi produk pembiayaan BPRS Amanah Ummah cabang Leuwiliang. Aktor yang berpengaruh dalam strategi yaitu kepala cabang, kepala bidang <i>marketing</i> dan <i>account officer</i>. Tujuan adalah mempertahankan dan memperkuat citra merk, mendorong masuknya nasabah baru dan menginformasikan kehadiran BPRS Amanah Ummah beserta produk dan keunggulannya. Alternatif strategi yang dapat dilakukan adalah dengan ikut serta dalam acara masyarakat sekitar, meningkatkan sponsorship dengan menjalin kerjasama dengan lembaga atau perusahaan lain untuk melakukan promosi, mengembangkan kegiatan</p>
------------------	---	---

-
- promosi baru yang lebih menarik, melaksanakan kegiatan promosi yg telah dilakukan sebelumnya dan mengembangkan promosi via website.
3. Berdasar AHP alternatif strategi yang menjadi prioritas adalah ikut serta mendukung kegiatan masyarakat sekitar perusahaan atau menagadak acara bertemakan kepedulian sebagai bentuk kegiatan publisitas dan humas.
 4. Uji kausalitas Granger membuktikan bahwa pembiayaan pertanian secara signifikan dipengaruhi oleh NPF, JDPK dan ERP
 5. Pada jangka panjang yang mempengaruhi pembiayaan pertanian adalah suku bunga SBI, bonus SBI syariah, JDPK, ERP pembiayaan pertanian, ERPDPK dan SBK
 6. Naiknya JDPK tidak otomatis membuat proporsi pembiayaan pertanian meningkat
-

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 4 | <p>Nama: Irfan Syauqi Beik dan Winda Nur Aprianti
Tahun: 2013
Judul: Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah untuk sektor pertanian di Indonesia</p> | <p>Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan sektor pertanian pada perbankan syariah di Indonesia pada Juli 2004 sampai dengan Desember 2010</p> | <p>Analisis data menggunakan metode VAR/VECM</p> |
|---|---|--|--|
-

<p>5 Nama: Khonsa Tsabita Tahun: 2013 Judul: Analisis risiko pembiayaan pada sektor pertanian kasus: BPRS Amanah Ummah Leuwiliang, Bogor</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi risiko pembiayaan untuk sektor pertanian dan risiko lainnya pada proses pembiayaan di BPRS Amanah Ummah 2. Menganalisis pengukuran dan pemetaan risiko pembiayaan untuk sektor pertanian dan risiko lainnya pada proses pembiayaan di BPRS Amanah Ummah 3. Menghitung potensi kerugian pembiayaan sektor pertanian 4. Menganalisis tindakan mitigasi 	<p>Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, metode ERM, metode aproksimasi dan metode creditrisk+</p>	<ol style="list-style-type: none"> 7. Hasil analisis <i>Impuls Respon Function</i> membuktikan bahwa pembiayaan pertanian paling cepat stabil ketika berhadapan dengan guncangan pada bonus SBI syariah dan hasil <i>Forecasting Error Variance Decomposition</i> menunjukkan bahwa variabel yang memberikan kontribusi terbesar terhadap keragaman pembiayaan pertanian adalah jumlah pembiayaan pertanian itu sendiri 1. Hasil identifikasi risiko pembiayaan dan risiko operasional yang berkaitan dengan sektor pertanian di BPRS Amanah Ummah menghasilkan 29 peristiwa risiko yang terdiri dari 16 peristiwa risiko pembiayaan, 11 peristiwa risiko operasional, dan 2 peristiwa risiko eksternal. 2. Hasil pengukuran risiko pembiayaan dan risiko operasional yang berkaitan dengan sektor pertanian di
--	---	--	--



	<p>risiko pembiayaan untuk sektor pertanian dan risiko lainnya pada proses pembiayaan di BPRS Amanah Ummah</p> <p>5. Mengidentifikasi penyebab dominasi penggunaan pembiayaan <i>murabahah</i> pada pembiayaan pertanian</p>		<p>BPRS Amanah Ummah menghasilkan pemetaan risiko dengan komposisi yaitu 9 peristiwa risiko dengan tingkatan <i>negligible</i>, 11 peristiwa risiko dengan tingkatan <i>acceptable</i>, 8 peristiwa risiko dengan tingkatan <i>undesirable</i></p> <p>3. Hasil perhitungan potensi kerugian pembiayaan syariah untuk sektor pertanian di BPRS Amanah Ummah diestimasi sebesar Rp 29 765 400.</p> <p>4. Mitigasi risiko yang telah ditetapkan BPRS Amanah Ummah</p> <p>5. Identifikasi penyebab kurang berkembangnya penggunaan produk pembiayaan selain <i>murabahah</i> pada sektor pertanian di BPRS Amanah Ummah menghasilkan 8 poin penting.</p>
<p>46 Nama:Azzahra Nuruddarajat Tahun:2013 Judul:Pengaruh Pembiayaan Koperasi Baytul Ikhtiar</p>	<p>1. Mengidentifikasi karakteristik anggota Koperasi Baytul Ikhtiar yang mendapatkan pembiayaan di sektor usaha mikro agribisnis</p>	<p>1.Data yang digunakan adalah data primer hasil wawancara dengan pihak KBI dan</p>	<p>1. Karakteristik anggota yang diidentifikasi adalah karakteristik responden, usaha responden dan pembiayaan</p>

<p>Terhadap Perkembangan Usaha Agribisnis Anggotanya</p>	<p>2. Menganalisis pengaruh pembiayaan dari Koperasi Baytul Ikhtiar terhadap pengembangan usaha mikro agribisnis anggota</p>	<p>nasabah serta data sekunder 2. Metode analisis menggunakan metode analisis kualitatif, kuantitatif dan analisis pendapatan usaha.</p>	<p>responden. 2. Hasil uji T data berpasangan menunjukkan omset, keuntungan dan aset usaha tidak berubah secara signifikan meski secara nominal mengalami perubahan.</p>
<p>47 Nama:Siti Sarah Anjani Tahun: 2013 Judul:Analisis Efektivitas Pembiayaan Sektor Pertanian Pada KBMT Ibaadurrahman Ciawi, Bogor</p>	<p>1. Mengidentifikasi dan menganalisis peran KBMT Ibaadurrahman dalam membantu menyelesaikan permasalahan permodalan bagi para nasabah khususnya yang bergerak dalam sektor pertanian 2. Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KBMT Ibaadurrahman untuk dapat menyalurkan pembiayaan syariah pada sektor pertanian secara optimal. 3. Menganalisis efektivitas skim pembiayaan syariah yang dilakukan oleh KBMT Ibaadurrahman pada sektor pertanian.</p>	<p>1. Data yang digunakan merupakan data sekunder time series bulanan (1996 – 2004) 2. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan komparatif</p>	<p>1. KBMT Ibaadurrahman berperan penting dalam pengembangan usaha para nasabah, diantaranya membantu menyediakan permodalan usaha, meningkatkan motivasi berusaha, meningkatkan kesejahteraan nasabah. 2. Faktor penyebab rendahnya penyaluran pembiayaan syariah pada sektor pertanian yaitu: kurangnya sosialisasi, keengganan petani untuk mengajukan pembiayaan karena takut terbebani hutang serta rendahnya pengetahuan petani mengenai pengelolaan keuangan (illiteracy financial), sistem pembayaran yang kurang sesuai dengan kegiatan</p>

III KERANGKA PEMIKIRAN

3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

3.1.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif atau analisis statistik deduktif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga data mudah dipahami. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal mengenai uraian atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena yang ada. Dengan kata lain fungsi dari analisis deskriptif adalah menerangkan, gejala atau persoalan berdasarkan data yang ada (Hasan, 2003).

3.1.2 Analisis Lingkungan BPRS

Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan yang berasal dari internal perusahaan atau organisasi sendiri. Kekuatan dan kelemahan berasal dari aktivitas organisasi atau perusahaan yang dapat dijalankan dengan baik atau sebaliknya. Aktivitas tersebut muncul dari aktivitas manajemen, pemasaran, keuangan, produksi-operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi manajemen dari sebuah bisnis. Faktor lingkungan internal perusahaan dapat dikategorikan menjadi enam kategori yaitu :

1. Manajemen

Fungsi manajemen terdiri dari lima aktivitas dasar perencanaan pengorganisasian, pemberi motivasi, pengelolaan staf dan pengendalian. Manusia merupakan sumberdaya terpenting bagi perusahaan sehingga diperlukan staf yang memiliki potensi yang sesuai dengan perusahaan dan memiliki perilaku yang positif.

2. Pemasaran

Pemasaran dapat digambarkan sebagai proses mendefinisikan, mengantisipasi, menciptakan serta memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan atas barang dan jasa. Ada tujuh fungsi dasar pemasaran yaitu analisis pelanggan atau nasabah, penjualan produk dan jasa, perencanaan produk dan jasa, penetapan harga, distribusi, riset pemasaran dan analisa peluang yang dimiliki perusahaan. Pemahaman mengenai fungsi

dasar tersebut dapat membantu dalam mengidentifikasi menyusun strategi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan.

3. Keuangan atau akuntansi

Perusahaan membutuhkan dana untuk kegiatan operasional. Oleh karena itu perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan seperti kemampuan perusahaan mengatur modal jangka pendek dan modal jangka panjang, hubungan baik dengan pemegang saham dan penanam modal, pengelola keuangan, struktur modal kerja, pemantauan penyebab inefisiensi dan sistem akunting yang handal. Selain itu upaya untuk menambah modal yang dimiliki dari Dana Pihak Ketiga serta memperhatikan inflasi yang terjadi.

4. Produksi operasi

Kegiatan produksi operasi perusahaan dapat dilihat dari keteguhan memegang prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas.

5. Penelitian dan pengembangan

Bidang utama yang harus diteliti kekuatan dan kelemahan dari faktor internal adalah penelitian dan pengembangan. Perusahaan membutuhkan penelitian dan pengembangan yang kuat dan terjamin kualitas penelitiannya agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Perusahaan yang melaksanakan strategi pengembangan harus memiliki orientasi penelitian dan pengembangan.

6. Sistem informasi manajemen

Informasi berfungsi untuk menghubungkan semua fungsi bisnis dan menyediakan dasar untuk semua keputusan manajerial dalam menjalankan perusahaan. Fungsi dari informasi manajemen adalah untuk mempermudah dalam memperbaiki kinerja yang belum sesuai dengan target perusahaan dengan memperbaiki kualitas keputusan manajerial dengan memanfaatkan data yang sudah terhubung karena sistem informasi. Sistem informasi yang efektif adalah dengan mengumpulkan data, memberikan simbol atau kode, menyimpan, mensistesis dan menyajikan informasi dalam bentuk yang dapat menjawab pertanyaan penting mengenai operasi dan strategis perusahaan.

Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang dan ancaman sebagian besar berasal dari luar organisasi dan berada diluar kendali organisasi atau perusahaan sehingga disebut faktor eksternal. Organisasi atau perusahaan dapat menyusun strategi untuk memanfaatkan peluang

yang dimiliki untuk mendapat keuntungan dan menghindari serta mengurangi ancaman yang datang pada perusahaan. Lingkungan eksternal dibagi menjadi lima kategori (David, 2009) :

1. Ekonomi

Kondisi ekonomi suatu daerah atau negara dapat mempengaruhi iklim bisnis suatu perusahaan. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menganalisis ekonomi suatu daerah atau negara adalah siklus bisnis, ketersediaan energi, inflasi, suku bunga, investasi, harga-harga produk dan jasa, produktivitas dan tenaga kerja.

2. Sosial, Budaya, Demografi dan Lingkungan

Kondisi sosial masyarakat yang berubah-ubah sehingga dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. Kondisi sosial ini mempunyai banyak aspek misalnya sikap, gaya hidup, adat istiadat dan kebiasaan dari orang-orang di lingkungan eksternal perusahaan. Sebagian kondisi ini hasil dari perkembangan kondisi kultural, ekologis, demografis, religius, pendidikan dan etnis. Kekuatan dari kondisi sosial bersifat dinamis.

3. Politik, Pemerintah dan Hukum

Stabilitas politik, kebijakan dan arah pemerintah mempengaruhi perusahaan kondisi perusahaan. Kondisi politik dan pemerintah yang tidak stabil akan memberikan pengaruh terhadap jalannya usaha begitu pula sebaliknya.

Beberapa variabel yang perlu diperhatikan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik adalah undang-undang tentang perbankan, stabilitas pemerintahan, peraturan perpajakan, peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia.

4. Teknologi

Setiap kegiatan usaha yang diinginkan untuk berjalan terus menerus harus mengikuti perkembangan teknologi yang digunakan pada produk atau jasa yang dihasilkan atau pada cara operasionalnya. Agar perusahaan tidak terpuruk karena kesalahan dalam penggunaan teknologi, maka penting untuk memperhatikan beberapa hal seperti kecepatan transfer teknologi oleh staf, keuangan teknologi, kesesuaian teknologi.

5. Kompetitif

Faktor ini berdasarkan hasil analisis kompetitif.

3.1.3 Analisis Matriks SWOT

Analisis SWOT merupakan salah satu alat untuk memaksimalkan peran faktor yang bernilai positif, meminimalkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan dampak negatif yang timbul dari ancaman yang datang.

Menurut Rahmat (2009) SWOT adalah analisis atas *Strengths* (kekuatan-kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan-kelemahan), *Opportunities* (peluang-peluang) dan *Threats* (ancaman-ancaman) yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Faktor-faktor yang tergolong dalam *strengths* adalah faktor-faktor internal yang bersifat positif yang memperkuat dan menstimulasi pencapaian sasaran yang direncanakan yang dimiliki atau berasal dan melekat pada bank yang bersangkutan. *Weaknesses* adalah faktor-faktor internal yang bersifat negatif yang memperlemah dan mengurangi kemampuan pencapaian sasaran yang dimiliki atau berasal dan melekat pada bank yang bersangkutan. *Opportunities* adalah faktor-faktor eksternal yang bersifat positif yang mendorong dan menstimulasi pencapaian sasaran yang berasal dari luar bank yang bersangkutan. Sedangkan *Threats* adalah faktor-faktor eksternal negatif yang mengurangi kemampuan pencapaian sasaran yang berasal dari luar bank yang bersangkutan. Hasil analisis SWOT adalah berupa sebuah matriks yang terdiri atas empat kuadran yang masing-masing kuadran merupakan perpaduan strategi antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Matriks analisis SWOT dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Matriks Analisis SWOT

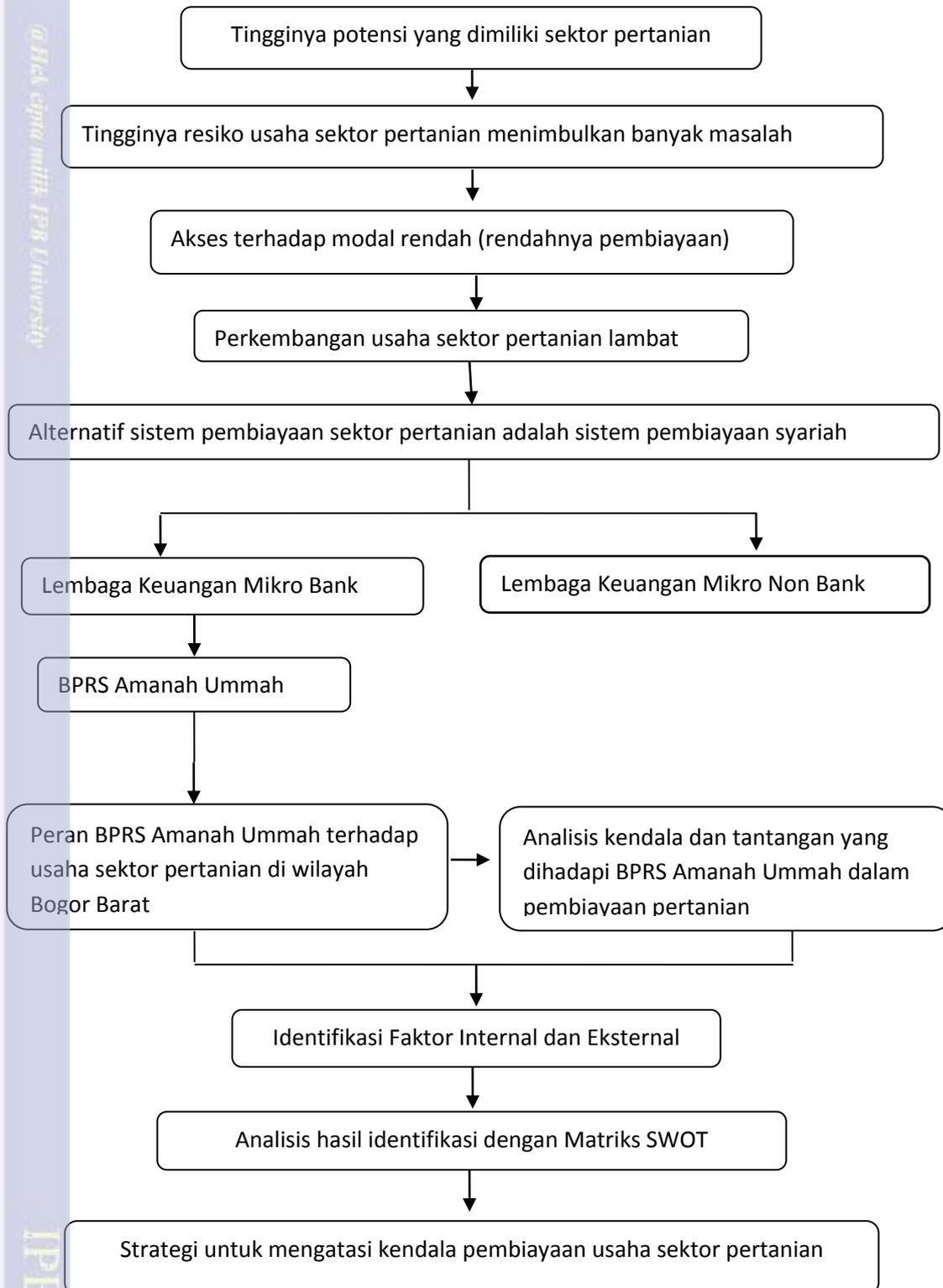
Faktor Eksternal	Faktor Internal	
	<i>Strengths</i>	<i>Weaknesses</i>
<i>Opportunities</i>	Strategi S-O Memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki	Strategi W-O Meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang
	Strategi S-T Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi W-T Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber : David, 2009

3.2 Kerangka Pemikiran Operasional

Peranan sektor pertanian terhadap PDB Indonesia dapat dikatakan memiliki peranan yang cukup besar dan masih berpotensi untuk meningkatkan kontribusi perannya apabila potensi yang ada dimanfaatkan secara maksimal. Banyak faktor yang membuat usaha sektor pertanian mengalami kendala untuk berkembang, salah satunya faktor modal. Berbagai macam program telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan permodalan sektor pertanian tetapi masih belum mampu mengatasi secara baik masalah yang ada.

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah pembiayaan dengan sistem syariah. Salah satu lembaga keuangan yang memiliki skim pembiayaan syariah untuk sektor pertanian adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kabupaten Bogor memiliki potensi pertanian yang cukup tinggi yang belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga masih memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Kabupaten Bogor sendiri memiliki beberapa BPRS yang tersebar di beberapa wilayah diantaranya adalah BPRS Amanah Ummah yang terletak di Leuwiliang. BPRS Amanah Ummah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki skim pembiayaan usaha sektor pertanian. BPRS Amanah Ummah menyediakan pembiayaan usaha sektor pertanian ini karena melihat potensi pertanian yang masih luas di Kabupaten Bogor, khususnya wilayah Bogor Barat. Skema operasional penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Operasional Penelitian

Tabel 9 Matriks Metode dan Analisis Data

No.	Tujuan	Sumber data	Analisis Pengolahan Data
1	Mengetahui peranan bank pembiayaan rakyat syariah Amanah Ummah terhadap pembiayaan usaha sektor pertanian	Data primer hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan usaha sektor pertanian BPRS Amanah Ummah dan data sekunder dari Annual Report BPRS Amanah Ummah	Analisis Deskriptif
2	Mengetahui tantangan dan kendala yang dihadapi BPRS Amanah Ummah dalam pembiayaan usaha sektor pertanian serta strategi untuk mengatasi kendala pembiayaan usaha sektor pertanian	Data primer hasil wawancara dengan pihak BPRS Amanah Ummah dan data sekunder dari Annual Report BPRS Amanah Ummah, jurnal, artikel dan literature lainnya	Analisis SWOT

Sumber :diolah oleh penulis 2014

4.5 Analisis SWOT

4.5.1 Identifikasi Peran BPRS Amanah Ummah terhadap Pembiayaan Sektor Pertanian

Kegiatan ini meliputi identifikasi 4 indikator perkembangan pembiayaan yang terdiri atas jumlah dana pihak ketiga, jumlah laba perusahaan, jumlah nasabah dan pembiayaan yang diberikan serta perkembangan pembiayaan untuk sektor pertanian. Kegiatan dilakukan dengan wawancara dan survey terhadap nasabah (pada Lampiran 1) dan pihak BPRS Amanah Ummah (pada Lampiran 2) mengenai pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah terhadap sektor pertanian di Bogor khususnya Bogor Barat kemudian hasil dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

Analisis deskriptif atau analisis statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga data mudah untuk dipahami. Analisis deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberi keterangan-keterangan mengenai data atau fenomena. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui peranan BPRS Amanah Ummah dan dampak keberadaaan BPRS Amanah Ummah bagi nasabah pembiayaan usaha sektor pertanian.

4.5.2 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

Perumusan strategi meliputi dua tahap yaitu tahap masukan (*input stage*) dan tahap pencocokan (*matching stage*). Tahap masukan merupakan tahap pengelompokan hasil identifikasi serta menyimpulkan informasi dasar yang digunakan untuk merumuskan strategi pada tahap pencocokan.

Identifikasi faktor internal dilakukan untuk meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh pihak BPRS Amanah Ummah dan faktor eksternal dilakukan untuk meringkas mengevaluasi peluang dan ancaman yang datangnya berasal dari luar BPRS Amanah Ummah.

4.5.3 Matriks SWOT

Setelah tahap input selesai dilakukan maka selanjutnya akan dilakukan adalah tahap pencocokan (*matching stage*) dengan menggunakan Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan alat untuk memaksimalkan peran faktor-faktor strategi yang bersifat positif, meminimalisasi faktor-faktor yang bersifat negatif baik yang berasal dari dalam tubuh organisasi atau berasal dari luar organisasi. Menurut David dalam Khairunnas (2009), analisis SWOT dilakukan dalam dua tahapan yaitu tahap identifikasi faktor SWOT dan tahap analisis SWOT. Tahap identifikasi faktor SWOT adalah tahapan yang mengidentifikasi bentuk-bentuk kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang dimiliki oleh pihak internal serta berbagai bentuk peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dari pihak eksternal. Sedangkan tahapan analisis SWOT adalah tahapan untuk merumuskan suatu strategi dengan mengkombinasikan faktor internal dengan faktor eksternal hasil dari tahap identifikasi kedalam sebuah matriks.

Hasil analisis SWOT adalah berupa sebuah matriks yang terdiri atas empat kuadran yang masing-masing kuadran merupakan perpaduan strategi antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal terkait kendala pembiayaan usaha sektor pertanian yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah serta mencari strategi yang dapat diterapkan oleh BPRS Amanah Ummah untuk mengatasi kendala dalam pembiayaan usaha sektor pertanian.

Tabel 10 Matriks Analisis SWOT

Faktor Internal

Faktor Eksternal	<i>Strengths</i>	<i>Weaknesses</i>
<i>Opportunities</i>	Strategi S-O Memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh BPRS Amanah Ummah	Strategi W-O Meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang dimiliki oleh BPRS Amanah Ummah
	Strategi S-T Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang datang terhadap pembiayaan usaha pertanian BPRS Amanah Ummah	Strategi W-T Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman datang terhadap pembiayaan usaha pertanian BPRS Amanah Ummah
<i>Threats</i>		

Sumber: David, 2009

V GAMBARAN UMUM PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah barat Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bogor berbatasan langsung dengan wilayah ibukota Indonesia yaitu DKI Jakarta. Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah sekitar 2 301.95 Km². Secara geografis Kabupaten Bogor terletak antara 6°18' - 6°47' 10 Lintang Selatan dan 106°23' 45-107°13' 30 Bujur Timur. Secara administratif wilayah Kabupaten Bogor berbatasan dengan beberapa wilayah sekaligus yaitu :

- Utara : Kota Depok, Kota/Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang
- Barat : Kabupaten Lebak (Provinsi Banten)
- Timur : Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang
- Selatan : Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur
- Tengah : Kota Bogor

Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan dan 428 desa dengan jumlah penduduk 5 077 210 jiwa serta kepadatan penduduk sebesar 19 Jiwa/Ha (Badan Pusat Statistik, 2014a). Sektor pertanian di Kabupaten Bogor mencakup tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Sektor pertanian memegang peranan penting bagi Kabupaten Bogor karena sebagian memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan sebagian besar masyarakat di pedesaan menjadikan sektor pertanian sebagai sektor utama mata pencaharian.

5.2 Gambaran Umum Kecamatan Leuwiliang

5.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Kecamatan Leuwiliang merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah barat Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Batas administratif wilayah Kecamatan Leuwiliang yaitu:

- Batas Utara : Kecamatan Leuwisadeng
- Batas Barat : Kecamatan Nanggung
- Batas Timur : Kecamatan Cibungbulang dan Kecamatan Pamijahan
- Batas Selatan : Provinsi Banten

Kecamatan Leuwiliang memiliki luas wilayah sekitar 61.51Km² pada ketinggian 101-700 mdpl dengan curah hujan pertahun rata-rata 519.29 mm dan kelembaban 20° - 25° C. Kecamatan Leuwiliang berada didaerah perbukitan dengan kemiringan 5° - 20°. Jarak dari Kecamatan Leuwiliang ke Ibukota Kabupaten Bogor (Cibinong) 30 km, Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) 147 km dan Ibukota Republik Indonesia (Jakarta) 80 km. Kecamatan Leuwiliang terdiri dari 11 desa yang terbagi menjadi 48 dusun. Desa yang ada di Kecamatan Leuwiliang adalah desa Purasari, Puraseda, Karyasari, Pabangbon, Karacak, Barengkok, Cibeber I, Cibeber II, Leuwimekar, Leuwiliang dan Karehkel. Kecamatan Leuwiliang memiliki kepadatan penduduk 119 869 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 1 948 Jiwa/Km² (Badan Pusat Statistik, 2014b)

5.2.2 Kondisi Perekonomian

Banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan Leuwiliang menunjukkan daerah ini memiliki perekonomian yang cukup tinggi. Selain itu Kecamatan Leuwiliang merupakan salah satu pusat perekonomian wilayah Bogor Barat. Kegiatan perekonomian penduduk Leuwiliang didominasi oleh kegiatan di sektor perdagangan. Kegiatan perekonomian penduduk Kecamatan Leuwiliang berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 11.

Banyaknya penduduk yang berprofesi sebagai pedagang karena implikasi dari berkembangnya pasar kecamatan yaitu Pasar Leuwiliang. Pasar Leuwiliang yang berada di pusat kecamatan ini menjadi pusat kegiatan perekonomian bagi masyarakat yang berada di wilayah Bogor Barat. Selain itu pasar Leuwiliang merupakan pasar terbesar sehingga mayoritas masyarakat dan pihak investor banyak melakukan investasi dan kegiatan ekonomi di pasar ini serta dapat dilihat dari banyaknya lembaga keuangan yang berada di Kecamatan Leuwiliang terutama disekitar Pasar Leuwiliang dibandingkan dengan wilayah lainnya di Bogor Barat.

pertama pada 11 Juli 1992 dan diresmikan oleh bupati Bogor pada 8 Agustus 1992.

BPRS Amanah Ummah memiliki visi, misi dan motto dalam menjalankan perusahaannya. Ada pun visi, misi dan motto BPRS Amanah Ummah adalah sebagai berikut :

Visi :

Menjadi BPR Syariah Pilihan Ummat

Menjadi BPR Syariah yang Amanah dan Profesional

Misi :

Membangun kualitas kehidupan ummat melalui perbankan syariah

Motto:

Meraih Laba-Menepis Riba-Mengundang Berkah

5.3.2 Struktur Organisasi BPRS Amanah Ummah

Struktur organisasi BPRS Amanah Ummah merupakan salah satu aspek yang menentukan perkembangan BPRS Amanah Ummah. Susunan struktur organisasi BPRS Amanah Ummah terlampir pada Lampiran 3. Tugas dan wewenang dari masing-masing bagian organisasi adalah sebagai berikut ;

1. Dewan Pengawas Syariah

Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah merumuskan produk yang dianggap dapat dilaksanakan di BPRS Amanah Ummah dan menjaga agar tetap sesuai dengan kaidah dan prinsip Islam serta mengawasi setiap produk yang telah ditetapkan. Kedudukan dewan ini sejajar dengan Dewan Komisaris.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh Dewan Direksi serta memastikan agar pelaksanaan tugas tetap sesuai dengan kaidah dan prinsip Islam serta kebijakan dari BPRS Amanah Ummah.

3. Dewan Direksi

Dewan direksi tugasnya adalah memimpin dan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan operasional di BPRS Amanah Ummah. Tugas lainnya adalah mewakili direksi atas nama BPRS Amanah Ummah dalam hubungan dengan pihak internal perusahaan.

Dewan direksi memimpin kepala cabang dan tiga kepala bidang yaitu Kepala Bidang Operasional, Kepala Bidang Umum dan Personalia dan Kepala Bidang *Marketing*.

4. Kepala Bidang Operasional

Kepala Bidang Operasional akan membawahi Kepala Bagian Sistem Informasi Manajemen (SIM), Kepala Bagian Layanan, Kepala Kantor Kas, bagian pembukuan, *Head Teller*, bagian deposito dan *Customer Service*. Sedangkan *Teller* akan dipimpin oleh *Head Teller*. Bidang Operasional mempunyai tugas dan wewenang melakukan supervisi dan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang operasional untuk menjamin tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

a. Kepala Bagian Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Tugas dari Kabag SIM (Kepala Bagian Sistem Informasi Manajemen) adalah melakukan pengawasan terhadap sistem kerja komputer perusahaan dan menangani semua yang berkaitan dengan modul terutama hal-hal yang berkaitan dengan *software* yang digunakan. Kabag SIM bertanggungjawab terhadap Kepala Bidang Operasional

b. Kepala Bagian Layanan

Tugas Kepala Bagian Layanan adalah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dan memastikan pelayanan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di BPRS Amanah Ummah serta melakukan koordinasi dan memberikan laporan kepada Kepala Bidang Operasional.

c. Bagian Pembukuan

Tugas dari staf pembukuan adalah melakukan pemeriksaan terhadap transaksi harian, menyusun dan menyajikan data keuangan BPRS Amanah Ummah kepada pihak manajemen. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menjamin data tersedia secara tepat waktu dimana data digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen.

d. *Head Teller*

Head Teller bertugas melaksanakan tugas sebagai *teller* dan mengkoordinir tugas untuk semua *teller* yang ada di BPRS Amanah Ummah.

e. *Teller*

Tugas utama *teller* adalah melayani penerimaan setoran dan pengambilan uang nasabah serta memberikan pelayanan yang baik terhadap nasabah.

f. *Customer Service*



Tugas dari *Customer Service* adalah menawarkan dan memberikan informasi tentang produk yang dimiliki BPRS Amanah Ummah kepada nasabah dan calon nasabah.

5. Kepala Bidang Umum dan Personalia

Kepala Bidang Umum dan Personalia membawahi bagian Umum dan Inventaris, Personalia dan Keuangan, dan Sekretariat. Bagian Umum dan Inventaris akan membawahi *Office Boy*, Satpam dan Sopir. Bagian Umum dan Personalia akan mengkoordinir dan melakukan supervisi pelaksanaan pembayaran gaji karyawan dan perhitungan pajak penghasilan tepat waktu, menyelesaikan permasalahan kepegawaian, mengkoordinir penyediaan dan pemeliharaan inventaris dan peralatan operasional kegiatan kantor serta mengkoordinir pengarsipan surat dan administrasi kantor lainnya.

6. Kepala Bidang *Marketing*

Kepala Bidang *Marketing* membawahi *Supervisor*, *Legal Officer*, bagian Gadai Emas, Kepala Bagian ADMP, dan *Funding Officer*. *Supervisor* akan membawahi *Account Officer* dan bagian *Remedial*. Bidang *Marketing* melakukan supervisi terhadap penghimpunan dana yang dilakukan oleh *Funding Officer*, mengevaluasi kelayakan pembiayaan yang diajukan oleh *Account Officer* dan bertanggungjawab terhadap operasional pembiayaan hingga penanganan pembiayaan bermasalah.

a. *Supervisor*

Tugas utamanya adalah melakukan supervisi dan evaluasi kelayakan pembiayaan yang diajukan oleh *Account Officer* serta melakukan supervisi dan pengawasan terhadap angsuran pembiayaan dari *Remedial*.

b. *Legal Officer (LO)*

Tugas dari *Legal Officer* adalah menerima permohonan survei dan taksasi jaminan, memeriksa kelengkapan legalitas data jaminan nasabah serta melakukan survei dan taksasi ke lapangan untuk dilaporkan kepada *Account Officer*, melakukan perjanjian pembiayaan dan menyimpan dokumen pembiayaan dan jaminan asli debitur dalam brankas jaminan, serta mempertanggungjawabkan tugasnya yang dilaksanakan kepada Kepala Bidang *Marketing*.

c. Bagian Gadai Emas

Bagian Gadai Emas bertugas untuk menganalisis keaslian dan kadar emas yang ada pada perhiasan yang akan digadaikan sehingga diketahui keaslian perhiasan tersebut sekaligus untuk melakukan penaksiran harga perhiasan yang akan digadaikan.

d. Kepala Bagian Administrasi Pembiayaan (ADMP)

ADMP bertugas untuk melakukan administrasi data debitur, melakukan proses pencairan pembiayaan dan membukukan angsuran pembiayaan debitur guna menjamin

data serta angsuran debitur tersimpan dengan lengkap. Bagian ADMP dipimpin oleh Kepala Bagian ADMP.

e. *Funding Officer*

Tugas dari *Funding Officer* adalah melakukan kegiatan pemasaran dalam rangka menghimpun dana masyarakat untuk memastikan tercapainya pelayanan kepada nasabah dan target penghimpunan dana yang telah ditetapkan.

f. *Account Officer*

Tugas *Account Officer* adalah melakukan program pembiayaan yang meliputi analisa kelayakan usaha, pengajuan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan dan melakukan pengawasan agar tercapai target pembiayaan yang telah ditentukan oleh perusahaan.

g. *Bagian Remedial*

Bagian *Remedial* bertugas untuk melakukan penjemputan atas setoran tabungan dan pembiayaan yang kemudian diserahkan kepada *teller* dan memastikan tepat waktu dalam penjemputan setoran.

7. Kepala Kantor Cabang

Kepala Kantor cabang akan membawahi Wakil Kepala kantor Cabang.

8. Internal Audit

Internal Audit bertugas untuk mengaudit perusahaan secara menyeluruh.

5.3.3 Produk Pembiayaan BPRS Amanah Ummah

BPRS Amanah Ummah memiliki beberapa produk diantaranya penghimpunan dana (tabungan) dan penyaluran dana. Produk penghimpunan dana yang dimiliki oleh BPRS Amanah Ummah diantaranya adalah Tabungan Wadiah, Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah*. Sedangkan untuk produk penyaluran dana yang disediakan oleh BPRS Amanah Ummah bermacam-macam jenisnya. Rincian produk penyaluran dana yang dimiliki oleh BPRS Amanah Ummah adalah sebagai berikut :

1. *Murabahah* (MBA)

Akad jual-beli barang antara bank sebagai pemilik barang dengan nasabah sebagai pembeli barang dimana harga yang diberikan oleh bank seharga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

2. *Istishna* (Ist)

Akad jual-beli barang atas dasar pesanan antara nasabah sebagai pemesan dan bank sebagai penyedia barang dengan spesifikasi tertentu yang diminta nasabah. Bank akan meminta produsen atau kontraktor untuk membuat barang pesanan sesuai dengan permintaan nasabah (*istishna parallel*) dan setelah barang tersedia nasabah akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati bersama.

3. *Ijarah* (IJR)

Akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan atau jasa antara pemilik obyek sewa (bank) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapat imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik obyek sewa.

4. *Ijarah Multi Jasa* (IMJ)

Ijarah Multi Jasa adalah akad pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dengan pembiayaan *Ijarah Multi Jasa* tersebut, bank dapat memperoleh imbalan jasa atau ujarah atau *fee*. Pembiayaan *Ijarah Multi Jasa* diperuntukkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan.

5. *Mudharabah* (MDA)

Akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) dimana keuntungan hasil usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya oleh kedua pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal atau dana (bank).

6. *Musyarakah* (MSA)

Akad kerjasama antara bank dengan nasabah untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak bank dengan keragian sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.

7. *Rahn* (Gadai Emas Syariah)

Akad kerjasama penyerahan barang berupa emas dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan untuk mendapat pembiayaan atau hutang dari bank.

8. *Qardhul Hasan* (QH)

Akad peminjaman dana oleh nasabah kepada bank syariah tanpa imbalan dengan kewajiban pihak nasabah mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dana untuk *Qardhul Hasan* bersumber dari infaq dan sedekah.

9. *Qardh* (QR)

Akad peminjaman dana oleh nasabah dari bank syariah tanpa imbalan yang diiringi kewajiban pihak nasabah mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dengan cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dana *Qard* umum dan haji bersumber dari modal atau laba bank.

5.3.4 Prosedur Pembiayaan BPRS Amanah Ummah

Prosedur pembiayaan yang dilakukan di BPRS Amanah Ummah memiliki beberapa tahapan mulai dari pengajuan pembiayaan sampai pada pelunasan pembiayaan. Adapun rincian tahapan pembiayaannya adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan pembiayaan

Tahap pertama calon debitur yang akan mengajukan pembiayaan akan mendatangi bagian Customer Service untuk mendapatkan informasi mengenai persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan dan membawa persyaratan tersebut kepada *Account Officer* (AO). Tugas utama AO adalah melakukan program pembiayaan yang meliputi analisis kelayakan usaha, pengajuan kepada komite pembiayaan, pemeriksaan calon nasabah, pendampingan kepada debitur yang mendapat pembiayaan serta melakukan pengawasan agar dapat memastikan tercapainya target pembiayaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan agar tidak terjadi debitur yang bermasalah. Setelah itu calon debitur mengisi formulir pembiayaan dan melengkapi persyaratan administrasi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut ;

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon,
- b. Fotokopi KTP suami/istri,
- c. Fotokopi kartu keluarga,
- d. Foto berwarna suami istri pemohon,
- e. Foto tempat usaha,
- f. Fotokopi jaminan (misal akte tanah, STNK, BPKB),
- g. Foto jaminan,

- h. Fotokopi rekening listrik, telepon, air selama tiga bulan terakhir
- i. Membuka rekening di BPRS Amanah Ummah (jika calon debitur belum memiliki rekening di BPRS Amanah Ummah).

2. Analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BPRS Amanah Ummah melalui dua tahap analisis yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif fokus pada keinginan calon debitur untuk membayar atau mengembalikan pembiayaan yang dinilai dari penilaian karakter dan komitmen. Sedangkan tahap kuantitatif berfokus pada kemampuan calon debitur untuk membayar atau mengembalikan pembiayaan yang dinilai dari penilaian modal usaha. Pada analisis pembiayaan menggunakan penilaian dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy and collateral*).

a. *Character* (karakter)

Karakter calon debitur merupakan salah satu aspek yang penting dalam pertimbangan memutuskan untuk memberikan pembiayaan. Calon debitur dinilai dari keseriusan membayar tagihan, kegiatan beragama, sosial dan lain-lain. Untuk memperoleh informasi mengenai calon nasabah biasanya AO akan mendatangi lingkungan tempat tinggal calon debitur dan menanyakan kepada ketua rukun tetangga (RT) serta masyarakat sekitar mengenai calon debitur. Apabila calon debitur pernah mendapatkan pembiayaan sebelumnya maka catatan mengenai pembiayaan yang pernah atau sedang diterima akan dilihat sebagai bahan pertimbangan.

b. *Capacity*

Kapasitas calon debitur dinilai dari kemampuan memenuhi kewajibannya. Kapasitas calon debitur dilihat dari omset usaha, kemampuan untuk menjalankan usaha dan lain-lain.

c. *Capital*

Penilaian jumlah modal yang dimiliki calon nasabah harus diketahui oleh pihak bank agar pembiayaan yang diberikan tidak melebihi modal yang dimiliki oleh calon debitur.

d. *Condition of economy*

Penilaian mengenai situasi dan kondisi ekonomi perlu menjadi pertimbangan terutama sektor yang berhubungan dengan usaha calon debitur. Penilaian dilihat dari kondisi ekonomi calon debitur, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, kondisi alam, kondisi ekonomi daerah dan sebagainya.

e. *Collateral*

Penilaian jaminan menjadi aspek penting dalam proses pembiayaan. Harta benda calon debitur yang akan diikat sebagai jaminan apabila debitur tidak dapat mengembalikan pembiayaan yang diberikan. Jaminan dibedakan menjadi tiga jenis yaitu jaminan likuid, non likuid dan fiducia. Jaminan likuid antara lain seperti tabungan dan deposito, sedangkan jaminan non likuid berupa rumah, tanah dan gedung serta jaminan fiducia yaitu benda bergerak yang diikat oleh kepemilikan seperti mobil dan motor. Penilaian jaminan dilakukan oleh *Legal Officer* (LO) untuk mengecek kelayakan jaminan melalui taksiran harga barang jaminan dan dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. Secara umum, tugas LO adalah menerima permohonan survei dan taksasi jaminan, memeriksa kelengkapan legalitas data jaminan debitur serta melakukan survei dan taksasi ke lapangan.

Setelah itu LO menyampaikan hasil pemeriksaan dan survei kepada AO atau komite pembiayaan, melakukan perjanjian pembiayaan serta menyimpan dokumen pembiayaan dan jaminan asli debitur.

3. Penilaian dokumen

Pada tahap ini AO menyusun hasil analisis dan survei menjadi proposal yang berisi profil calon debitur dan usahanya yang telah dinilai dari berbagai aspek untuk diajukan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan.

4. Pengajuan ke Komite Kebijakan Pembiayaan

Proposal yang telah disusun kemudian dipresentasikan oleh AO yang bersangkutan di depan Komite Kebijakan Pembiayaan dan memberikan argumentasi untuk meyakinkan komite bahwa calon nasabah layak mendapat pembiayaan. Tahapan komite yang harus dilewati tergantung pada besar pengajuan plafon pembiayaan.

Jika pengajuan dibawah Rp 3 500 000 maka tahapan yang harus dilewati adalah bagian AO, Kabid *marketing* kemudian direktur. Jika pengajuan berada

antara Rp 3 500 000 sampai dengan Rp 100 000 000 maka tahapan yang harus dilewati adalah bagian AO, Kabid *marketing*, direktur kemudian direktur utama.

Jika pengajuan diatas Rp 100 000 000 maka tahapan yang dilalui adalah bagian AO, Kabid *marketing*, direktur, direktur utama kemudian dewan komisaris.

5. Persetujuan dan pengikatan

Setelah mendapat persetujuan dari Komite Kebijakan Pembiayaan maka selanjutnya calon debitur dipanggil untuk membuat kesepakatan mengenai akad, besar pembiayaan yang akan diberikan yang nominalnya telah disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan, besar angsuran, jangka waktu pembiayaan dan syarat lainnya. BPRS Amanah Ummah melakukan perhitungan biaya yang ditetapkan dari hasil perhitungan sedekah dan zakat sesuai dengan kesepakatan nasabah dan menetapkan sesuai harga berlaku.

6. Pencairan

Setelah kesepakatan tercapai maka tahapan selanjutnya adalah pencairan pembiayaan yang dilakukan oleh ADMP. Waktu yang diperlukan untuk memproses pengajuan pembiayaan hingga pencairan dana maksimal dua minggu. Waktu tersebut berlaku untuk nasabah yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan, sedangkan untuk nasabah yang sudah pernah mengajukan pembiayaan untuk pengajuan pembiayaan selanjutnya hanya membutuhkan waktu maksimal satu minggu untuk prosesnya. Khusus untuk pembiayaan dengan akad *mudharabah* pencairan dilakukan secara bertahap.

7. Pembinaan dan pengawasan

Pada tahap ini, pihak AO melakukan pembinaan kepada nasabah sesuai dengan usaha masing-masing nasabah. Tindakan pengawasan dalam pelaksanaan usaha dan pengembalian pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah disepakati juga menjadi perhatian dalam rangka mencegah terjadi masalah selama proses pembiayaan.

8. Pelunasan pembiayaan

Tahapan terakhir ini apabila nasabah telah selesai melaksanakan kewajiban pengembalian pembiayaan kepada pihak BPRS Amanah Ummah.

@Mik cipta mitr IPB University

Mak Cipta Mitraning Umahing-unahing

1. Diarahke mengutus sababgon uba selira uba kanya kung ipb terpa mhuadunomuan dan mpepeddikan kumbar :
- a. Pergadrhan hmasa arbak kengathigan sendidikan, awaslabuan, perulisan kanya emmah, pemaksimalan leparan, pemulisan kritis atau tujuhan suatu masalah
- b. Pengetahuan tidak mengutuh kengathigan yang wajar ipb University
2. Diarahke mengumuskan dan mentipertanyak selagan uba selira uba kanya kung ipb dalam kumbar apapan terpa ipb ipb University

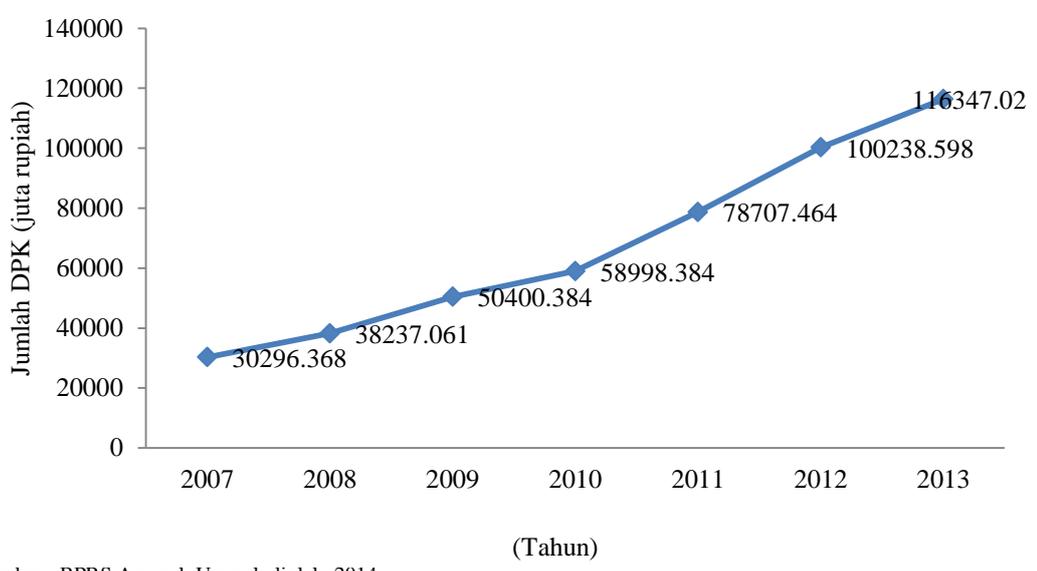


VI HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Peran BPRS Amanah Ummah Terhadap Pembiayaan Usaha Sektor Pertanian

Sejak berdiri tahun 1992 BPRS Amanah Ummah terus mengalami perkembangan dalam berbagai aspeknya usaha termasuk di usaha penyaluran dana. Usaha penyaluran dana mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Indikator pembiayaan berkembang atau tidak menurut Beik dan Ariyanti (2013) dapat dilihat dari 4 aspek yaitu peningkatan jumlah dana pihak ketiga, jumlah laba perusahaan, jumlah nasabah dan pembiayaan yang diberikan.

Jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun BPRS Amanah Ummah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring berkembangnya usaha BPRS Amanah Ummah seperti yang ditunjukkan dalam grafik Gambar 2 dan Lampiran 3.

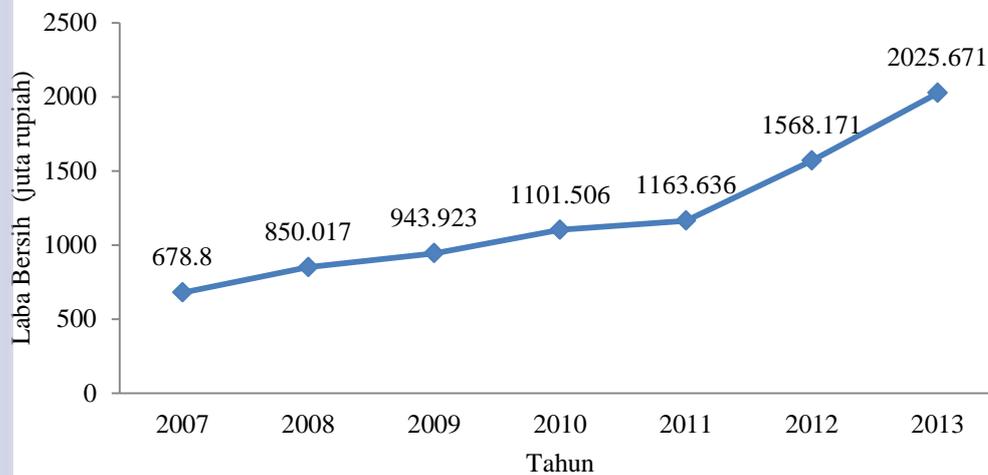


Sumber : BPRS Amanah Ummah diolah, 2014

Gambar 2 Jumlah Dana Pihak Ketiga BPRS Amanah Ummah Tahun 2007-2013

Tahun 2007 Dana Pihak Ketiga yang dihimpun dan dikelola oleh BPRS Amanah Ummah adalah sebesar Rp 30 296 368 000 namun dalam kurun enam tahun Dana Pihak Ketiga yang dihimpun dan dikelola meningkat lebih dari 300% yaitu sebesar Rp 116 347 020 000 pada tahun 2013.

Seiring berjalannya waktu BPRS Amanah Ummah terus mengalami perkembangan dari segala aspek mulai dari manajemen perusahaan, bertambah jumlah kantor cabang, memperluas cakupan wilayah dan jenis usaha, jumlah nasabah dan lain-lain. Perkembangan yang dialami BPRS Amanah Ummah berdampak pada peningkatan laba yang diperoleh. Laba yang diperoleh masih termasuk keuntungan kotor karena belum dikurangi dengan pajak, infaq dan sedekah. Setelah dihitung pajak, infaq dan sedekah yang harus dikeluarkan maka sisa dari perhitungan itulah yang menjadi laba bersih yang akan diperoleh oleh BPRS Amanah Ummah. Laba bersih yang diperoleh BPRS Amanah Ummah terus meningkat dari tahun ke tahun ditunjukkan oleh Gambar 3 dan Lampiran 4.

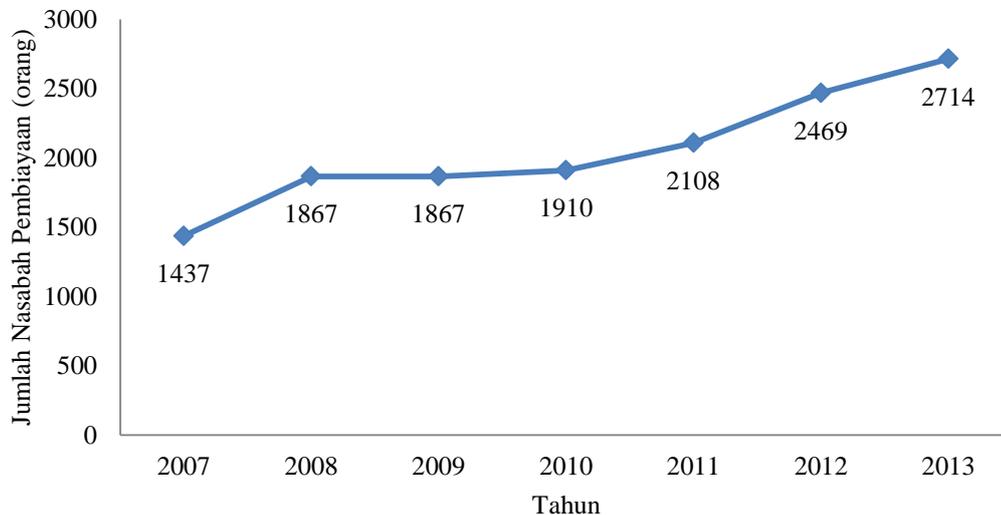


Sumber : BPRS Amanah Ummah diolah, 2014

Gambar 3 Laba Bersih BPRS Amanah Ummah Tahun 2007 - 2013

Peningkatan laba bersih yang diperoleh BPRS Amanah Ummah tidak sama setiap tahun. Laba bersih yang diperoleh BPRS Amanah Ummah pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 678 800 000. Dalam jangka waktu enam tahun laba bersih yang diperoleh BPRS Amanah Ummah mengalami kenaikan hampir 300%. Pada tahun 2013 laba bersih yang diperoleh BPRS Amanah Ummah adalah sebesar Rp 2 025 671 000. Laba bersih yang diperoleh oleh BPRS Amanah Ummah meningkat hampir 300% dalam jangka waktu enam tahun. Laba bersih yang diperoleh tidak hanya karena peningkatan usaha tetapi juga karena jumlah nasabah yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

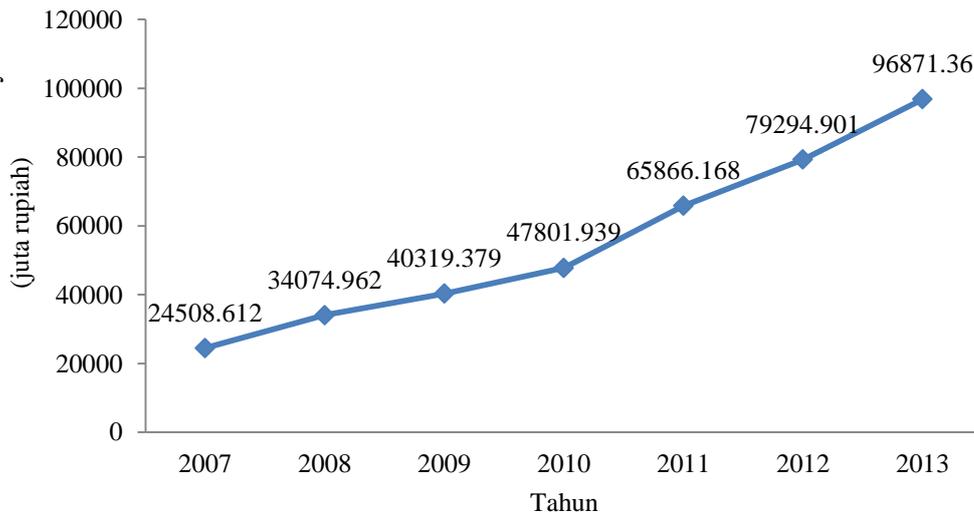
Jumlah nasabah pembiayaan dari tahun ke tahun semakin meningkat jika dilihat dari pembiayaan per sektor ekonomi seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 4 dan Lampiran 5.



Sumber : BPRS Amanah Ummah diolah, 2014

Gambar 4 Jumlah Nasabah Pembiayaan BPRS Amanah Ummah Tahun 2007 - 2013

Jumlah nasabah pembiayaan BPRS Amanah Ummah berdasar sektor ekonomi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2008 dan 2009 jumlah nasabah tidak mengalami perubahan tetapi secara nominal mengalami peningkatan jumlah nominal pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Amanah Ummah. Nasabah pembiayaan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 9.92% (meningkat sejumlah 245 nasabah) dari jumlah nasabah pembiayaan pada tahun 2012. Jumlah nasabah yang terus mengalami peningkatan menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi terhadap BPRS Amanah Ummah. Jumlah nominal pembiayaan yang diberikan setiap tahun terus mengalami peningkatan seperti yang terdapat dalam Gambar 5 dan Lampiran 6.



Sumber : BPRS Amanah Ummah diolah, 2014

Gambar 5 Jumlah Nominal Usaha Pembiayaan di BPRS Amanah Ummah Tahun 2007 - 2013

Jumlah nominal pembiayaan yang ditunjukkan pada Gambar 5 menunjukkan bahwa setiap tahun pembiayaan yang diberikan terus mengalami peningkatan meski jumlah nasabah pada tahun 2008 dan 2009 memiliki jumlah yang sama. Jumlah nominal pembiayaan pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari Rp 79 294 901 000 pada 2012 menjadi Rp 96 871 360 000 atau meningkat sebesar 22.16%. Nominal usaha pembiayaan yang terus mengalami peningkatan menunjukkan bahwa usaha pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah mengalami kemajuan dari tahun ke tahunnya.

Sampai saat ini tidak ada pengalokasian jumlah nominal dana untuk pembiayaan masing-masing sektor. Selama *Financing to Deposit Ratio* (FDR) BPRS Amanah Ummah masih dibawah 80% dari dana yang dimiliki maka pembiayaan akan diberikan. Meski tidak ada pengalokasian secara khusus jumlah nominal pembiayaan, nominal pembiayaan yang diberikan untuk sektor yang ada di BPRS Amanah Ummah tidak sama untuk masing-masing sektor. Berikut tabel rincian sektor dan jumlah nominal pembiayaan untuk masing-masing sektor yang mendapatkan pembiayaan di BPRS Amanah Ummah pada tahun 2013.

Tabel 12 Rincian Sektor dan Nominal Pembiayaan per Sektor di BPRS Amanah Ummah Tahun 2013

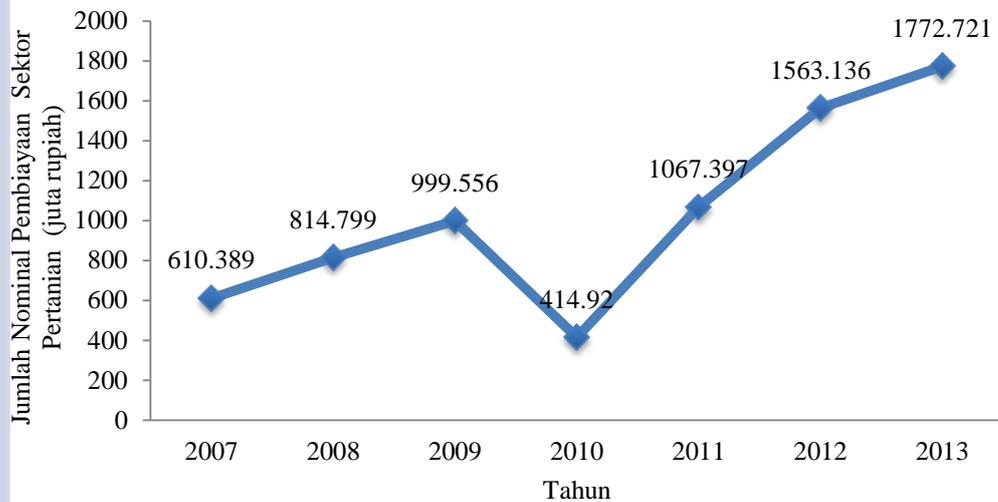
Sektor Usaha	Nominal	Persentase (%)
1. Pertanian	1 772 721 000	1.83
2. Industri	2 049 788 000	2.12
3. Jasa	9 798 731 000	10.12
4. Perdagangan	44 902 196 000	46.35
5. Lain-lainnya	38 347 924 000	39.59
Total	96 871 360 000	100.00

Sumber : BPRS Amanah Ummah, 2014

Pada Tabel 12 dijelaskan bahwa perdagangan masih mendominasi sektor usaha lainnya pada pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Amanah Ummah yaitu sebesar 46.59%, sedangkan sektor lain-lainnya sebesar 39.59%, sektor jasa sebesar 10.12%, sektor industri 2.12% dan sektor pertanian sebesar 1.83%. Data di atas menunjukkan bahwa masih sedikit sektor pertanian yang mendapatkan pembiayaan yaitu kurang dari 2% dari pembiayaan yang diberikan BPRS Amanah Ummah. Sektor perdagangan mendominasi karena lokasi BPRS Amanah Ummah yang berada di Pasar Leuwiliang sehingga lebih banyak pedagang yang mendapat pembiayaan meski potensi sektor pertanian Leuwiliang dan sekitarnya masih tinggi.

Perkembangan jumlah nominal yang diberikan untuk pembiayaan pada sektor pertanian sejak tahun 2007 – 2013 dapat dilihat pada Gambar 6 dan Lampiran 7. Gambar 6 menjelaskan mengenai perkembangan jumlah nominal pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPRS Amanah Ummah untuk pembiayaan usaha sektor pertanian. Pada Gambar 6 terlihat jumlah nominal pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan BPRS Amanah Ummah yang terus meningkat. Meski terus mengalami peningkatan pembiayaan pertanian di BPRS Amanah Ummah sempat mengalami penurunan pada tahun yang cukup signifikan dibanding tahun 2009 menurun sebesar Rp 584 636 000 dari Rp 999 556 000 pada 2009 menjadi Rp 414 920 000 pada tahun 2010 atau menurun sebesar 58.49%. Setelah pembiayaan menurun lebih dari 50% pada 2010, pada tahun 2011 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 652 477 000 menjadi Rp 1 067 397 000 atau mengalami peningkatan 157.25%. Sepanjang tahun 2013 nominal jumlah pembiayaan yang dikucurkan untuk usaha sektor pertanian mencapai Rp 1 772 721 000. Pembiayaan yang dikucurkan di sektor pertanian ini meningkat jika

dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 1 563 136 000.



Sumber : BPRS Amanah Ummah diolah, 2014

Gambar 6 Jumlah Nominal Pembiayaan Sektor Pertanian BPRS Amanah Ummah 2007-2013

Jumlah nominal yang diberikan meningkat seiring dengan meningkatnya nasabah yang mendapatkan pembiayaan usaha sektor pertanian yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13 Rincian Jumlah Nasabah Pembiayaan Sektor Pertanian BPRS Amanah Ummah 2007 - 2013

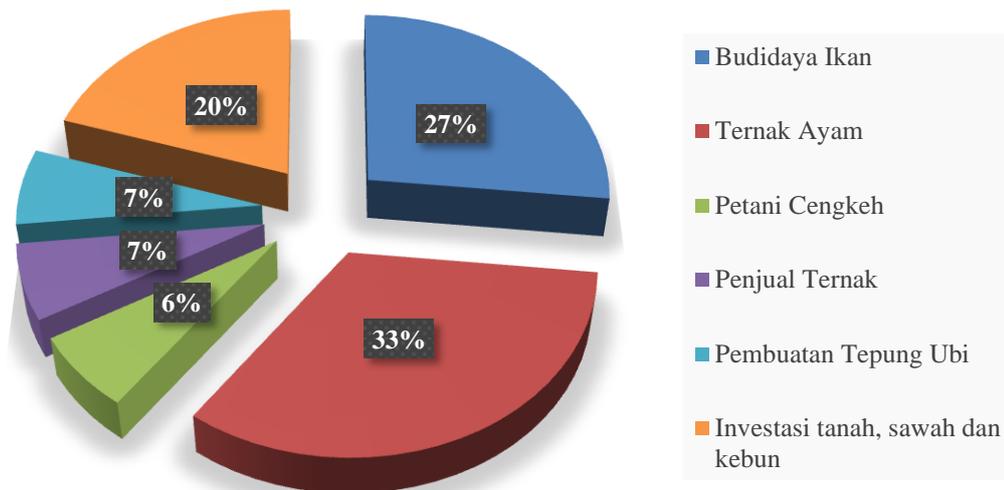
Tahun	Jumlah Nasabah (orang)
2007	8
2008	7
2009	7
2010	12
2011	21
2012	22
2013	29

Sumber: BPRS Amanah Ummah diolah 2014

Nasabah pembiayaan sektor pertanian tidak hanya berasal dari wilayah Bogor Barat karena mulai tahun 2013 BPRS Amanah Ummah Cabang Cicurug

Sukabumi juga memberikan pembiayaan pada sektor pertanian. Pada penelitian ini yang diambil hanya debitur yang berada di wilayah Bogor Barat. Usaha pertanian yang mendapatkan pembiayaan dari BPRS Amanah Ummah yaitu pertanian dalam arti luas dimana peternakan dan perikanan juga termasuk yang mendapatkan pembiayaan.

Survei lapang terhadap 15 debitur menunjukkan jenis usaha yang dimiliki nasabah adalah beternak ayam sebanyak 33%, disusul oleh jenis usaha budidaya ikan dan lele sebanyak 27%, untuk berinvestasi tanah, sawah dan kebun 20% dan sisanya adalah untuk pembuatan tepung ubi, bertani cengkeh dan penjualan ternak kambing dan domba. Sebaran jenis usaha sektor pertanian debitur yang dibiayai oleh BPRS Amanah Ummah pada tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 7.



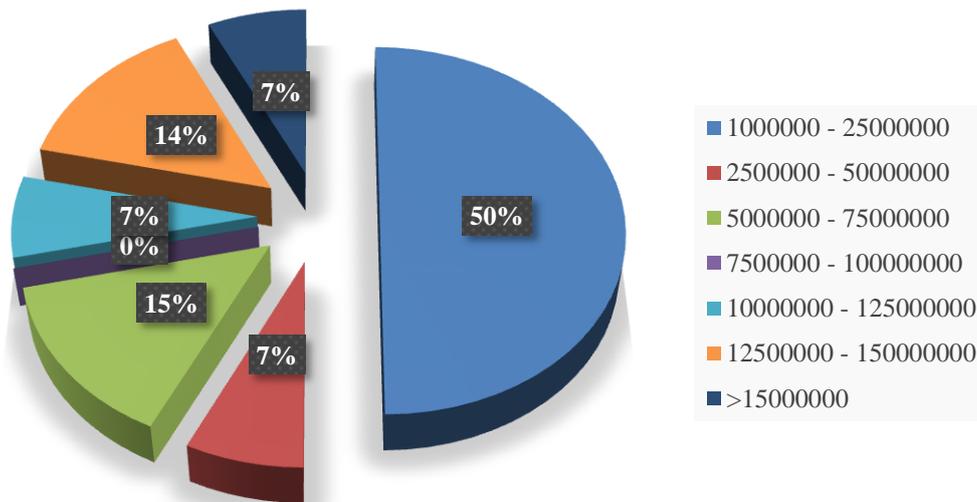
Sumber : data primer diolah 2014

Gambar 7 Jenis Usaha Nasabah Pembiayaan Sektor Pertanian BPRS Amanah Ummah Tahun 2013

Dari jumlah 15 nasabah yang mendapatkan pembiayaan, masing-masing nasabah mendapatkan nominal pembiayaan yang berbeda-beda. Nominal pembiayaan yang diberikan tergantung pada jenis usaha, pengajuan pembiayaan, jenis jaminan yang diberikan, *track record* pada pembiayaan sebelumnya dan lain-lain. Semakin besar prospek usaha dan jaminannya maka semakin besar pembiayaan yang diberikan.

Pembiayaan yang diajukan rata-rata untuk menutupi kekurangan modal atau mengembangkan usaha sehingga mayoritas hanya mendapatkan pembiayaan dikisaran Rp 1 000 000 – Rp 25 000 000. Meski begitu tidak jarang juga ada yang mengajukan untuk keseluruhan modal awal usaha. Hasil survei dan data dari BPRS Amanah Ummah menunjukkan bahwa 50% debitur atau sebanyak 7 orang menerima pembiayaan antara Rp 1 000 000 – Rp 25 000 000, lalu 15% atau 2 orang debitur menerima pembiayaan antara Rp 50 000 000 – Rp 75 000 000.

Selanjutnya 14% debitur atau 2 orang menerima pembiayaan antara Rp 125 000 00 – Rp 150 000 000, 7% debitur yang mendapat pembiayaan berkisar antara Rp 25 000 000 – Rp 50 000 000, 7% debitur yang mendapat pembiayaan antara Rp 100 000 00 – Rp 125 000 000 dan 7% debitur yang mendapat pembiayaan > Rp 150 000 000. Sebaran nominal pembiayaan yang diterima masing-masing debitur dapat dilihat pada Gambar 8.

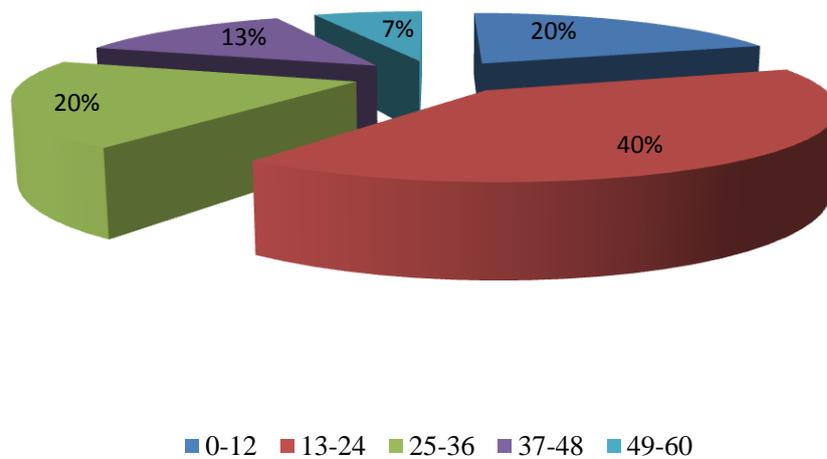


Sumber :data primer diolah 2014

Gambar 8 Jumlah Pembiayaan Usaha Sektor Pertanian BPRS Amanah Ummah Tahun 2013

Debitur memiliki kewajiban mengembalikan nominal pembiayaan yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu pengembalian pembiayaan ditentukan berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan, hasil perhitungan zakat dan sedekah serta kesepakatan antara pihak BPRS Amanah Ummah dengan debitur mengenai waktu pengembalian pembiayaan. Pengembalian juga dilihat dari kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa 40% debitur mengembalikan pembiayaan dalam jangka waktu 13-24 bulan, 20% debitur dalam jangka waktu 0-12 bulan, 20% debitur dalam jangka waktu 25-36 bulan, 13% debitur dalam jangka waktu 37-48 bulan dan 7% debitur dalam jangka waktu 49-60 bulan. Sebaran jangka waktu pengembalian pembiayaan oleh debitur dapat dilihat pada Gambar 9.



Sumber :data primer diolah 2014

Gambar 9 Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan Sektor Pertanian

Banyaknya debitur yang mengajukan pembiayaan sektor pertanian sebagian besar mendapatkan informasi adanya pembiayaan sektor pertanian di BPRS Amanah Ummah adalah berasal dari staf BPRS Amanah Ummah sendiri karena mayoritas debitur juga memiliki simpanan atau tabungan di BPRS Amanah Ummah.

Sebagian besar debitur mengatakan bahwa mereka mengetahui informasi mengenai adanya pembiayaan usaha sektor pertanian di BPRS Amanah Ummah berasal dari staf BPRS Amanah Ummah. Ada juga yang menyatakan mendapat informasi mengenai pembiayaan berasal dari teman dan tetangga. Kesadaran masyarakat mengenai sistem syariah menjadikan hal tersebut sebagai alasan sebagian besar nasabah dalam mengajukan pembiayaan kepada BPRS Amanah Ummah.

6.2 Faktor yang Menjadi Kendala BPRS Amanah Ummah dalam Penyaluran Kredit Usaha Sektor Pertanian

6.2.1 Tahapan Masukan (*Input Stage*)

Tahap masukan merupakan tahap dimana informasi yang diperoleh dari identifikasi faktor internal dan faktor eksternal akan digunakan untuk menyusun strategi pada tahap pencocokan dengan analisis SWOT. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan atau BPRS Amanah Ummah yang

berpengaruh terhadap penyaluran kredit khususnya untuk sektor pertanian yaitu berupa kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang berasal dari luar organisasi atau BPRS Amanah Ummah yang memberikan berpengaruh terhadap penyaluran kredit khususnya untuk sektor pertanian yang dilaksanakan oleh BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor.

6.2.2 Identifikasi Faktor Internal

Dari hasil wawancara dengan pihak BPRS Amanah Ummah dapat diidentifikasi lima faktor kekuatan dan empat faktor kelemahan dari usaha pembiayaan khususnya pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah. Faktor internal yang dimiliki BPRS Amanah Ummah yang mempengaruhi pembiayaan khususnya pembiayaan sektor pertanian dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14 Faktor Internal BPRS Amanah Ummah

Faktor-Faktor Internal
<p>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pembiayaan syariah yang jauh dari riba dan bunga 2. Lokasi kantor BPRS Amanah Ummah yang terjangkau dan strategis 3. Bagi hasil dan sedekah yang ditentukan bersama 4. Lembaga keuangan pertama yang memberikan pembiayaan sektor pertanian di wilayah Bogor 5. Jumlah sumberdaya manusia di divisi <i>marketing</i> yang mencukupi <p>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan alokasi pembagian tugas antar sumberdaya manusia bagian <i>marketing</i> masih kurang terstruktur rapi 2. Prosedur pengajuan pembiayaan yang cukup panjang 3. Alokasi dana untuk pembiayaan dibatasi 4. Informasi mengenai pembiayaan pertanian oleh BPRS Amanah Ummah yang belum tersebar merata 5. Sistem pemasaran produk penyaluran dana yang masih kurang baik.

Sumber :data primer diolah 2014

6.2.3 Identifikasi Faktor Eksternal

Hasil wawancara dengan pihak BPRS Amanah Ummah dapat diidentifikasi lima peluang yang dimiliki oleh BPRS Amanah Ummah dan ancaman yang datang terhadap pembiayaan usaha sektor pertanian yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah. Faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan khususnya pembiayaan sektor pertanian ditampilkan pada Tabel 15.

Tabel 15 Faktor Eksternal BPRS Amanah Ummah

 Faktor-faktor Eksternal

Peluang (*Opportunities*)

1. Potensi pertanian di wilayah Bogor Barat yang cukup tinggi
2. Dukungan pemerintah dan pihak terkait tentang perkembangan sektor pertanian
3. Belum banyak lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan usaha di sektor pertanian
4. Tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi terhadap BPRS Amanah Ummah
5. Luas lahan pertanian dan banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani di wilayah Bogor Barat

Ancaman (*Threats*)

1. Fluktuasi harga komoditi hasil pertanian
 2. Persaingan dengan lembaga keuangan lainnya
 3. Debitur yang bermasalah
-

Sumber :data primer diolah 2014

6.3 Strategi untuk Mengatasi Kendala Penyaluran Kredit Usaha Sektor Pertanian

Setelah tahap masukan selesai dilaksanakan maka selanjutnya dilakukan tahap pencocokan dengan menggunakan matriks SWOT. Analisis SWOT dilaksanakan setelah berdiskusi dengan pihak BPRS Amanah Ummah terkait usaha pembiayaan sektor pertanian. Untuk menyusun strategi yang akan diterapkan maka digunakan tabel matriks SWOT yang disusun dari hasil identifikasi faktor internal dan eksternal yang diperoleh dari tahap masukan. Dari tabel matriks yang telah dibuat akan muncul strategi-strategi yang diharapkan dapat diterapkan dalam rangka mengatasi kendala dan tantangan yang terdiri dari strategi SO (*Strengths-Opportunities*), WO (*Weaknesses-Opportunities*), ST (*Strengths-Threats*) dan WT (*Weaknesses-Threats*).

Tabel 16 Matriks Analisis SWOT

	<i>S – Strengths</i>	<i>W – Weaknesses</i>
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pembiayaan syariah yang jauh dari riba dan bunga 2. Lokasi BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor yang terjangkau dan strategis 3. Bagi hasil kompetitif dan ditentukan bersama 4. Lembaga keuangan pertama memberikan pembiayaan sektor pertanian di wilayah Bogor Barat 5. Jumlah sumberdaya manusia divisi <i>marketing</i> yang mencukupi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi tugas antar sumberdaya manusia di divisi <i>marketing</i> masih kurang terstruktur rapi 2. Prosedur pembiayaan cukup panjang 3. Alokasi dana pembiayaan dibatasi 4. Informasi mengenai pembiayaan sektor pertanian belum tersebar merata 5. Sistem pemasaran produk
Faktor Eksternal	<p><i>O – Opportunities</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi sektor pertanian bogor barat yang cukup tinggi 2. Dukungan pemerintah dan pihak lain 3. Belum banyak lembaga keuangan yang memberi pembiayaan usaha sektor pertanian 4. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPRS Amanah Ummah 5. Luas lahan pertanian dan masih banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan peternak <p><i>T – Threats</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fluktuasi harga komoditi pertanian 2. Persaingan dengan lembaga keuangan lain 3. Debitur yang bermasalah 	<p>Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah presentase alokasi dana untuk pembiayaan sektor pertanian dengan menerapkan bagi hasil kompetitif (S3, S4, O1, O3) 2. Memperluas cakupan wilayah pembiayaan (S2, S5, O1, O5) 3. Memberi reward kepada nasabah yang usahanya berkembang setelah mendapat pembiayaan (S1, O4) <p>Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya sumberdaya manusia atau staf yang memiliki kompetensi memadai dan memahami betul usaha sektor pertanian (S5, T1, T2) <p>Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyederhanakan proses pengajuan pembiayaan (W2, O1) 2. Bekerja sama dengan dinas atau pihak terkait untuk mengadakan sosialisasi mengenai pembiayaan dan pengembangan usaha sektor pertanian (W4, O2) 3. Membuka kesempatan bagi pihak lain yang ingin berinvestasi (W3, O2, O3, O4) 4. Memperjelas struktur tupoksi sumberdaya manusia bagian <i>marketing</i> agar lebih efektif dan efisien sehingga mampu memperluas wilayah pembiayaan sektor pertanian (W1, O1, O5) <p>Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia divisi <i>marketing</i> dalam menganalisis dan menilai kelayakan terhadap pengajuan pembiayaan usaha nasabah (W1, T3) 2. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap debitur yang mendapat pembiayaan melalui manajemen usaha dan pendampingan teknologi (W1, T1, T2, T3)

Berdasarkan hasil matriks SWOT yang berhasil disusun maka diperoleh beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk mengatasi tantangan dan kendala yang dihadapi BPRS Amanah Ummah dalam usaha pembiayaan di sektor pertanian. Beberapa strategi yang bisa dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Strategi SO (Strengths-Opportunities)

Strategi SO (*Strengths-Opportunities*) merupakan strategi yang memanfaatkan kekuatan internal yang dimiliki oleh BPRS Amanah Ummah untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal yang dimiliki oleh BPRS Amanah Ummah.

A. Menambah presentase alokasi dana untuk pembiayaan sektor pertanian dengan menerapkan bagi hasil yang kompetitif (S4, O1, O3)

Jumlah dana pihak ketiga yang cenderung mengalami peningkatan memberikan peluang untuk meningkatkan pembiayaan yang diberikan khususnya untuk sektor pertanian. Pada tahun 2013 dapat dilihat bahwa sektor pertanian hanya mendapatkan 1.83% dari total pembiayaan yang diberikan sepanjang tahun 2013. Peningkatan alokasi dana ini juga harus diikuti dengan peningkatan jumlah nasabah dan pengajuan pembiayaan. Sedangkan untuk meningkatkan jumlah pengajuan pembiayaan maka dapat dilakukan dengan menerapkan bagi hasil sedekah dan zakat yang kompetitif dengan lembaga keuangan lain.

Dengan menerapkan bagi hasil yang kompetitif maka diharapkan calon nasabah atau nasabah yang memiliki dan mengelola usaha sektor pertanian akan tertarik mengajukan pembiayaan usaha untuk sektor pertanian kepada BPRS Amanah Ummah. Apabila banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan usaha sektor pertanian pihak BPRS Amanah Ummah dapat menggunakan peningkatan dana yang dihimpun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang akan diberikan kepada debitur.

B. Memperluas cakupan wilayah usaha pembiayaan pertanian (S2, S5, O1, O5)

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor penting di Kabupaten Bogor khususnya wilayah Bogor Barat. Sektor pertanian menjadi sektor utama mata pencaharian penduduk Kabupaten Bogor khususnya wilayah Bogor Barat yang mayoritas tinggal di pedesaan dan lahan pertanian di Kabupaten Bogor cukup luas dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Di wilayah Bogor Barat masih banyak masyarakat yang memiliki usaha di sektor pertanian dalam arti luas seperti peternakan (sapi, ayam, kambing), perikanan, perkebunan dan persawahan.

Selain itu juga dapat menambah ranah pembiayaan tidak hanya untuk pertanian secara budidaya tetapi dapat ditambah dengan usaha pasca produksi dan agroindustri. Oleh karena itu masih besar kemungkinan untuk memperluas cakupan wilayah usaha pembiayaan pertanian. Dengan jumlah sumberdaya manusia di divisi *marketing* yang mencukupi dan pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas maka memungkinkan untuk melakukan perluasan wilayah pembiayaan sehingga nasabah pembiayaan sektor pertanian dapat bertambah.

Usaha menambah debitur dengan cara memperluas wilayah usaha pembiayaan bisa dilakukan dengan menawarkan secara langsung pada nasabah pada saat melakukan aktivitas perbankan, turun secara langsung ke daerah yang memiliki potensi pertanian dan menawarkan langsung kepada pelaku usahatani untuk mengajukan pembiayaan kepada BPRS Amanah Ummah, bekerja sama dengan koperasi usahatani atau kelompok tani sehingga pelaku usahatani yang tergabung dengan koperasi usahatani atau kelompok tani bersedia mengajukan pembiayaan bagi usahanya pada BPRS Amanah Ummah dengan penawaran khusus seperti mendapatkan kemudahan dalam proses pembiayaan atau mendapatkan asuransi kesehatan selama masa pembiayaan.

C. Memberi *reward* kepada debitur yang usahanya berkembang setelah mendapat pembiayaan (S1, O4)

Reward diberikan kepada debitur yang usahanya berkembang setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS Amanah Ummah dan debitur yang

pengembalian pembiayaannya berjalan lancar dan tepat waktu. *Reward* diberikan sebagai bentuk penghargaan dari pihak BPRS Amanah Ummah terhadap usaha debitur mengembangkan usaha sektor pertanian yang dimiliki atau dikelolanya dan atas ketepatan waktu pengembalian pembiayaan sehingga diharapkan debitur akan merasa dihargai usahanya, dipercaya dan terjalin kedekatan dengan pihak BPRS Amanah Ummah.

Apabila debitur merasa dipercaya, dihargai dan merasa dekat dengan pihak BPRS, diharapkan jika debitur tersebut membutuhkan pembiayaan selanjutnya akan mengajukan kembali ke BPRS Amanah Ummah dan merekomendasikan kepada teman dan koleganya untuk mengajukan pembiayaan di BPRS Amanah Ummah khususnya untuk pembiayaan usaha sektor pertanian. *Reward* yang diberikan kepada debitur bisa berupa barang, tabungan atau uang yang diberikan pada akhir masa pembiayaan atau setelah pelunasan pembiayaan dilakukan.

2. Strategi WO (Weaknesses-Opportunities)

Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*) adalah strategi yang memanfaatkan peluang eksternal yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan yang berasal dari internal BPRS Amanah Ummah dalam usaha pembiayaan sektor pertanian.

A. Menyederhanakan prosedur pengajuan pembiayaan yang diterapkan untuk pembiayaan sektor pertanian (W2, O1)

Prosedur pembiayaan atau penyaluran dana yang dilakukan di BPRS Amanah Ummah tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan untuk masing-masing sektor. Perbedaan yang ada saat ini hanya pada akad yang dipergunakan pada pembiayaan. Saat ini prosedur pembiayaan syariah yang dilaksanakan oleh BPRS Amanah Ummah belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dan akad pembiayaan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah untuk masing-masing sektor.

Pada sektor pertanian diharapkan pihak BPRS menerapkan akad *Istishna* dan *Ba'i Salam*, sedangkan pada saat ini pihak bank masih menggunakan akad *Murabahah*. Pihak BPRS menganggap resiko menggunakan akad tersebut masih

cukup tinggi dan merepotkan pihak BPRS serta nasabah yang rata-rata usahanya merupakan usaha kecil belum memiliki *cash flow* yang baik.

Untuk mengatasi hal tersebut pihak BPRS mewajibkan nasabah yang mendapat pembiayaan untuk melaporkan realisasi pembiayaan yang diberikan dengan menyerahkan bukti pembelian atau penggunaan dana yang digunakan agar terlihat kesesuaian dengan tujuan pengajuan pembiayaan nasabah dan agar pembiayaan yang dilakukan tepat sasaran. Meski hal tersebut menjadi kewajiban akan tetapi ada beberapa nasabah yang merasa keberatan dikarenakan tempat tinggal mereka yang cukup jauh dari lokasi BPRS Amanah Ummah Leuwiliang. Alternatif yang dapat dilakukan adalah pada saat pengajuan pembiayaan usaha pertanian, staf BPRS Amanah Ummah dapat melakukan pembinaan bagi nasabah untuk membuat pembukuan dengan baik.

B. Bekerjasama dengan pemerintah setempat, dinas atau pihak terkait untuk mengadakan sosialisasi kepada pelaku usahatani di kawasan bogor barat mengenai pembiayaan usaha dan pengembangan usaha sektor pertanian (W4, W5, O2)

Perlunya kerjasama dengan pihak lain dalam menyampaikan informasi mengenai pembiayaan usaha pertanian kepada pelaku usahatani dikarenakan pihak BPRS mengalami beberapa kendala. Terkadang pihak BPRS tidak bisa secara langsung memberikan informasi kepada pelaku usahatani karena terkendala jarak atau pemahaman pelaku usahatani berbeda terhadap penyampaian dari pihak BPRS. Oleh karena itu diperlukan pihak lain untuk menyampaikan atau menjembatani pelaku usahatani dengan pihak BPRS. Selain itu karena tidak semua nasabah atau pelaku usahatani berani mengajukan pembiayaan karena merasa tidak mampu untuk mengembalikan pembiayaan atau karena tidak mengetahui bahwa di BPRS Amanah Ummah tersedia pembiayaan usaha sektor pertanian.

Di Kabupaten Bogor kegiatan ini dilakukan melalui bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Koperasi dan UKM Perindag dengan cara ikut berpartisipasi dalam program dan kegiatan yang dilakukan dinas-dinas tersebut seperti ikut serta dalam program peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis pertanian dan pengembangan usaha

agribisnis perkebunan . Alternatif lain yang bisa dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan koperasi usahatani, kelompok tani atau kelompok penyuluh pertanian dengan cara mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada pelaku usahatani mengenai pengembangan usaha sektor pertanian dan pembiayaan usaha pertanian yang didalamnya terdapat informasi bahwa BPRS Amanah Ummah memiliki skim pembiayaan untuk usaha sektor pertanian dan ikut bekerja sama dalam mensukseskan program kerja dinas-dinas tersebut. Dengan mengadakan kerjasama dan sosialisasi ini diharapkan pelaku usahatani dapat mengerti mengenai potensi usahatani yang dijalankannya dan tertarik untuk mengembangkan usaha dengan cara mengajukan pembiayaan usaha pada BPRS Amanah Ummah.

C. Meningkatkan partisipasi pihak luar dalam meningkatkan jumlah dana yang dihimpun oleh BPRS Amanah Ummah (W3, O2, O4)

Meski Jumlah Dana Pihak Ketiga (JDPK) yang berhasil dihimpun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi nilainya masih lebih rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional (OJK 2015). Sejauh ini dana yang dihimpun berasal dari tabungan masyarakat, deposito dan dana pemegang saham. Untuk pemegang saham masih untuk kalangan terbatas sedangkan untuk tabungan dan deposito telah dibuka umum.

Membuka kesempatan bagi pihak lain untuk ikut berinvestasi atau menanamkan modalnya dalam bentuk saham akan meningkatkan jumlah dana yang dimiliki oleh BPRS Amanah Ummah sehingga dana yang tersedia untuk pembiayaan meningkat sehingga dapat menyalurkan dana lebih banyak untuk pembiayaan khususnya pembiayaan di sektor pertanian.

D. Memperjelas struktur tupoksi sumberdaya manusia divisi *marketing* agar lebih efektif dan efisien sehingga mampu menambah nasabah dan memperluas wilayah pembiayaan usaha sektor pertanian (W1, O1, O5)

Jumlah staf di divisi *marketing* BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor secara umum mencukupi untuk menjalankan segala aktivitas *marketing* perbankan. Namun dalam pembagian tugas pada saat ini kurang jelas dan menjadi

kurang efektif dan efisien bagi staf yang ada dalam menjalankan tugas. Pembagian tugas yang merata untuk setiap staf tanpa memperhitungkan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing staf menyebabkan terjadinya penumpukan pekerjaan pada masing-masing staf *marketing* karena tidak semua memiliki kemampuan yang sama. Hal ini berpengaruh pada kinerja masing-masing staf dan divisi tersebut. Selain itu menyebabkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan lebih lama.

Memperjelas struktur tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kemampuan staf dilakukan agar staf bisa lebih maksimal dalam melakukan tugasnya. Jika masing-masing staf dapat bekerja secara efektif dan efisien maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas akan lebih singkat dan dapat dimanfaatkan untuk mencari nasabah yang lebih banyak.

3. Strategi ST (Strengths-Threats)

Strategi ST (*Strengths-Threats*) adalah strategi yang memanfaatkan kekuatan internal yang dimiliki oleh BPRS Amanah Ummah untuk mengurangi dan mengatasi ancaman yang datang dari luar yang mengancam kelangsungan usaha pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah.

A. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia di divisi *marketing* mengenai usaha sektor pertanian (S5, T1, T2)

Usaha pembiayaan sektor ekonomi memiliki spesifikasi tersendiri di masing-masing sektor usaha. Usaha pembiayaan sektor pertanian tidak sama dengan usaha pembiayaan sektor jasa, maka dari itu perlu kemampuan yang berbeda pula. Memiliki staf yang benar-benar memahami dan memiliki kompetensi yang memadai mengenai usaha sektor pertanian bertujuan agar analisis usaha pembiayaan pertanian yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah mengalami perkembangan dan dampak yang positif bagi BPRS Amanah Ummah serta nasabah yang mendapat pembiayaan.

Selain itu juga memiliki staf yang kompeten dapat meminimalisir kerugian yang mungkin dialami oleh BPRS Amanah Ummah dan mengantisipasi persaingan dengan lembaga keuangan lain yang menyediakan pembiayaan usaha

sektor pertanian. Pada saat membuka lowongan pekerjaan perlu untuk merekrut staf yang memiliki kemampuan yang memadai dalam usaha pertanian mulai dari hulu sampai ke hilir baik secara *off-farm* maupun *on-farm* dan staf yang ada disarankan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan yang diadakan oleh BPRS Amanah Ummah atau pihak luar mengenai usaha sektor pertanian sehingga staf dapat memahami dengan baik mengenai usaha sektor pertanian.

4. Strategi WT (Weaknesses-Threats)

Strategi WT (*Weaknesses-Threats*) merupakan strategi defensif yang dimiliki oleh BPRS Amanah Ummah. Strategi ini dilakukan jika kelemahan yang berasal dari internal dan ancaman yang datang dari eksternal lebih besar atau kuat dibandingkan kekuatan internal dan peluang yang dimiliki oleh BPRS Amanah Ummah sehingga perlu mengurangi atau meminimalisir kerugian yang mungkin dialami oleh BPRS Amanah Ummah.

A. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia di divisi *marketing* dalam menganalisis dan memberikan penilaian kelayakan pengajuan pembiayaan usaha debitur (W1, T3)

Sebagian besar usaha debitur yang mengajukan pembiayaan termasuk ke dalam usaha mikro dan dalam mengelola usahanya masih secara tradisional. Pada umumnya mereka belum memiliki manajemen usaha dan tata cara pembukuan usaha yang baik sehingga tak jarang mempersulit dalam proses pengajuan pembiayaan. Hal ini juga mempersulit staf BPRS dalam melakukan penilaian karena data dan informasi calon debitur termasuk dalam penilaian kelayakan. Oleh karena itu untuk melengkapi data yang dibutuhkan maka adanya staf yang memiliki kemampuan yang memadai dalam proses analisis dan penilaian kelayakan usaha sektor pertanian sangat diperlukan. Baik untuk staf yang turun ke lapang untuk melakukan penilaian maupun staf yang menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari debitur dan staf lapang.

Staf lapang dan staf yang menganalisis informasi dan data dari debitur dan staf lapang haruslah orang yang berbeda. Apabila dilakukan oleh satu orang saja dikhawatirkan penilaian yang dilakukan tidak objektif. Dengan melakukan

analisis dan penilaian yang lebih selektif terhadap calon debitur dan usahanya maka diharapkan dapat meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi karena kelalaian dalam penilaian dan menghindari debitur yang memiliki potensi untuk menimbulkan masalah dikemudian hari.

B. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap debitur yang mendapat pembiayaan melalui manajemen usaha dan pendampingan teknologi (W1, T1, T2, T3)

Sebagian besar usaha debitur yang mendapatkan pembiayaan merupakan usaha kecil dan dikelola secara tradisional serta belum memiliki manajemen usaha yang baik sehingga mempersulit proses pembiayaan. Pada saat pengajuan perlu diadakan pendampingan untuk melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan. Setelah debitur mendapatkan pembiayaan maka diperlukan pembinaan lanjutan untuk usaha debitur tersebut. Tujuan dilakukan pembinaan dan pendampingan ialah supaya debitur memiliki kemampuan untuk mengelola usahanya dengan baik.

Pembinaan yang dilakukan dapat berupa pelatihan manajemen usaha, pembuatan *cashflow* serta pendampingan teknologi. Pada pembiayaan usaha kegiatan pembinaan dan pendampingan oleh pihak BPRS memiliki fungsi yang penting bagi debitur yang mendapatkan pembiayaan dari pihak BPRS. Pembinaan dan pendampingan ini dimaksudkan agar selama proses pembiayaan diberikan oleh BPRS Amanah Ummah tepat sesuai sasaran, usaha yang dimiliki debitur berkembang, mendekatkan hubungan antara debitur dengan pihak BPRS Amanah Ummah serta meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi bagi pihak BPRS dan debitur pembiayaan.

VII SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan yaitu

1. Peran BPRS Amanah Ummah dalam usaha pertanian debiturnya masih rendah. BPRS Amanah Ummah hanya berperan sebatas penyedia dana pembiayaan. Pembiayaan usaha pertanian yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jika dilihat dari jumlah nominal pembiayaan dan jumlah debitur yang mendapatkan pembiayaan usaha pertanian. Jumlah nominal pembiayaan usaha pertanian yang diberikan setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring meningkatnya jumlah debitur yang mengajukan dan mendapatkan pembiayaan usaha sektor pertanian.
2. Faktor yang menjadi kendala dan strategi yang dapat dilakukan bagi BPRS Amanah Ummah dalam penyaluran kredit usaha sektor pertanian adalah

2.1 Faktor kendala pembiayaan usaha pertanian adalah

- a. Koordinasi tugas antar sumberdaya manusia di divisi *marketing* masih belum terstruktur rapi
- b. Prosedur pembiayaan yang cukup rumit
- c. Informasi mengenai pembiayaan sektor pertanian yang belum diketahui secara luas oleh masyarakat
- d. Sistem *marketing* yang belum efektif
- e. Fluktuasi harga komoditi pertanian
- f. Persaingan dengan lembaga keuangan lainnya
- g. Debitur yang mendapat kredit usaha pertanian cenderung mengalami masalah sehingga BPRS Amanah Ummah perlu lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan atau kredit.

2.2 Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala pembiayaan usaha pertanian diantaranya

- a. Membenahi struktur pembagian tugas dan sumberdaya manusia divisi *marketing*.
- b. Menyederhanakan proses pengajuan pembiayaan.
- c. Bekerja sama dengan dinas terkait seperti Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Koperasi dan UKM Perindag dengan cara berpartisipasi dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh dinas-dinas tersebut.
- d. Memperbaiki sistem pemasaran produk perbankan yang selama ini dijalankan oleh BPRS Amanah Ummah.
- e. Pemberian *reward* terhadap debitur yang usahanya mengalami peningkatan setelah mendapatkan pembiayaan dan yang tepat waktu dalam pengembalian pembiayaan.
- f. Pendampingan terhadap debitur yang mendapat pembiayaan melalui manajemen usaha dan pendampingan teknologi.

7.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Untuk mengembangkan pembiayaan usaha pertanian BPRS Amanah Ummah perlu mengadakan kerjasama dengan ikut berpartisipasi dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dinas-dinas terkait seperti Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Koperasi dan UKM Perindag, koperasi usahatani dan gapoktan.
2. BPRS Amanah Ummah diharapkan lebih giat dalam melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pembiayaan pertanian di Kabupaten Bogor khususnya wilayah Bogor Barat karena masih tinggi potensi pertanian yang ada di wilayah tersebut.
3. BPRS Amanah Ummah perlu memiliki staf yang kompeten dalam pembiayaan pertanian.
4. BPRS Amanah Ummah perlu merestrukturisasi tugas staf divisi *marketing* dan prosedur pembiayaan yang selama ini diterapkan termasuk pemberian pendampingan usaha kepada debitur yang mendapatkan pembiayaan. Selain itu BPRS Amanah Ummah dapat mendengarkan saran dan keluhan dari

nasabah sebagai bahan masukan untuk perkembangan BPRS Amanah Ummah.

5. Untuk penelitian selanjutnya, menganalisis lebih lanjut kecenderungan penggunaan akad *Murabahah* dalam pembiayaan pertanian dan faktor kendala dalam penerapan akad yang sesuai dengan pertanian.

@Hik cipta mitr IPB University

Hik Cipta (Hindone) Unmang'urandeng

1. Diambil mengutip sebagian atau seluruh karya yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan :

- a. Pengutipan harus menyebutkan sumbernya, asal sumber, jumlah karya yang dikutip, jenisnya, dan tujuan untuk masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Diambil mengutipkan dan mentranskripkan sebagian atau seluruh karya tulis yang dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



- _____. 2008. Laporan Tahunan (Annual Report) 2007 BPRS Amanah Ummah. Bogor
- Badan Pusat Statistik. 2015. Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2000-2014. Jakarta
- _____. 2014a. Kabupaten Bogor Dalam Angka 2013. BPS Kabupaten Bogor. Bogor
- _____. 2014b. Kecamatan Leuwiliang Dalam Angka 2013. BPS Kabupaten Bogor. Bogor
- Darmawi H. 2012. Manajemen Perbankan. Bumi Aksara. Jakarta
- David FR. 2009. Strategic Management. Dono Sunardi, penerjemah. Salemba Empat. Jakarta
- Direktorat Pembiayaan. 2011. Pola Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana. Kementerian Pertanian. Jakarta
- Fidaus R, Ariyanti M. 2009. Manajemen Perkreditan Bank Umum. Alfabeta. Bandung
- Hasan MI. 2003. Pokok-pokok Materi Statistik 1(Statistic Deskriptif). Bumi Aksara. Jakarta
- Herlina L. 2008. Strategi Pengembangan Usaha Kecil Apple Pie Group (Studi Kasus di Unit Usaha Pia Apple Pie Bogor) [tesis]. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Isterah. 2014. Dampak Ekonomi dan Strategi Pengelolaan Kebun Raya Bogor Sesuai Daya Dukung Kawasan Wisata [skripsi]. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Kasmir. 2012. Manajemen Perbankan. Raja Grafindo. Jakarta
- Kurnia F. 2009. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Syariah pada Sektor Agribisnis [skripsi]. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Mukarom A. 2009. Analisis Persepsi Petani Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor) [skripsi]. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Mulyarto EP. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia Unit Leuwiliang Kabupaten Bogor [skripsi]. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Nuruddarajat A. 2013. Pengaruh Pembiayaan Koperasi Baytul Ikhtiar Terhadap Pengembangan Usaha Agribisnis Anggotanya [skripsi]. Institut Pertanian Bogor. Bogor

- Otoritas Jasa Keuangan. 2015a. Statistik Perbankan Syariah Desember 2014 [Internet]. [diunduh 2015 Mei]. Tersedia pada: <http://www.ojk.go.id/data-statistik-perbankan-syariah-desember-2014>
- _____. 2015b. Daftar alamat BPRS [Internet]. [diunduh 2015 Maret 12]. Tersedia pada: <http://www.ojk.go.id/Files/statistik/BPRS.pdf>
- Rangkuti F. 2008. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Rudjito. 2003 .Peran LKM dalam Otonomi Daerah guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan menanggulangi kemiskinan :studi kasus Bank BRI .Jurnal Ekonomi Rakyat . Tersedia pada: <http://www.ekonomirakyat.org>
- Sari DR. 2006. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan di Kabupaten Bogor [skripsi]. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Shinta A. 2011. Ilmu Usahatani. UB Press. Malang
- Sholihin AI. 2010. Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah . Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Soemitra A. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Soekartawi et all. 1986. Ilmu Usahatani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil . UI-Press. Jakarta.
- Sutawi. 2008. Pembiayaan Syariah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sektor Agribisnis dengan Pola Kemitraan. Jurnal Keuangan dan Perbankan. 12(3): 447 – 458. Bogor
- Tsabita K. 2013. Analisis Risiko Pembiayaan Syariah Pada Sektor Pertanian Kasus : BPRS Amanah Ummah, Leuwiliang, Bogor [skripsi]. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

oMies cpta milik IPB University



Maka Cipta Jembatan, Undang undang

1. Di dalam lingkungan sebagian atau seluruhnya yang merupakan pemukiman dan pemukiman sumber :

- a. Perumahan yang sudah dibangun, dan/atau, perbaikan, pemeliharaan, pemukiman kembali atau perbaikan masalah
- b. Perumahan tidak terjangkau, perumahan yang rusak atau rusak parah.

2. Dalam lingkungan yang merupakan pemukiman atau pemukiman yang rusak parah atau rusak parah.

oMies cipta milik IPB University



Maka Cipta Justru yang Lindang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya yang terdapat secara elektronik dan mempedatkan sumber :
 - a. Perbaikan hasil karya intelektual yang diterbitkan, jurnalistik, jurnalistik, jurnalistik karya ilmiah, jurnalistik kejuruan, jurnalistik kejuruan atau jurnalistik kejuruan
 - b. Menyalin hasil karya intelektual yang diterbitkan, jurnalistik kejuruan, jurnalistik kejuruan atau jurnalistik kejuruan
2. Dilarang menggunakan hasil karya intelektual yang diterbitkan, jurnalistik kejuruan, jurnalistik kejuruan atau jurnalistik kejuruan

Lampiran 1 Kuesioner Nasabah Pembiayaan Sektor Pertanian BPRS Amanah Ummah



INSTITUT PERTANIAN BOGOR
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN
Jl. Kamper Wing 5 Level 5 Kampus IPB Dramaga Bogor 16680
Telepon (0251) 421 762, (0251) 621 834, Fax (0251) 421 762

KUESIONER NASABAH USAHATANI BPRS AMANAH UMMAH

Tanggal wawancara :

No. Responden :

Kuesioner ini digunakan sebagai bahan skripsi mengenai “Peran BPRS Amanah Ummah Terhadap Pengembangan Usaha Sektor Pertanian”. Saya mohon partisipasi saudara untuk mengisi kuisisioner ini dengan teliti dan lengkap sehingga dapat menjadi data yang objektif. Informasi yang saudara berikan akan dijamin kerahasiaannya, tidak untuk dipublikasikan dan tidak digunakan untuk kepentingan politis. Atas perhatian dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.

I. Identitas Responden

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis kelamin :
4. Alamat :
5. No Telp :
6. Pekerjaan :
 - a. Petani
 - b. Peternak
 - c. Pedagang
 - d. Guru
 - e. Lainnya, sebutkan.....

II. Profil Usaha

1. Jenis Usaha :
2. Lama Usaha :tahun
3. Luas Lahan :Ha
4. Status Lahan :
5. Komoditi :

III. Peran BPRS Amanah Ummah Terhadap Pengembangan Usaha

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mengajukan pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah ?
2. Alasan mengajukan pembiayaan di BPRS Amanah Ummah ?
 - a. Prosedur mudah
 - b. Bunga rendah
 - c. Pencairan dan cepat
 - d. Lokasi dekat
 - e. Lainnya, sebutkan.....
3. Kapan terakhir Bapak/Ibu mendapatkan pembiayaan ?
4. Sudah berapa kali mendapat pembiayaan dari BPRS Amanah Ummah ?
5. Berapa besar pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Amanah Ummah ?
Rp _____
6. Apakah saat ini Bapak/Ibu memperoleh pembiayaan dari Bank/BPRS lain?
 - a. Ya, (*lanjut ke pertanyaan no 7*)
 - b. Tidak (*lanjut ke pertanyaan no 9*)

7. Dari Bank/BPRS mana Bapak/Ibu mendapat pembiayaan lainnya?

No	Nama Bank/BPRS	Jumlah Pembiayaan
1		
2		
3		

8. Perbandingan Bank/BPRS lain dengan BPRS Amanah Ummah

No	Aspek yang dinilai	BPRS AU	Bank/BPRS lain
1	Kemudahan prosedur pengajuan pembiayaan	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
2	Kemudahan pengembalian pembiayaan	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
3	Nisbah bagi hasil (suku bunga kredit)	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
4	Pelayanan	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3

Ket = 1: Mudah/rendah, 2: Cukup, 3: sulit/tinggi

9. Darimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi mengenai adanya pembiayaan sektor pertanian yang ada di BPRS Amanah Ummah ?



- a. Keluarga/Saudara
- b. Tetangga
- c. Teman
- d. Staff BPRS Amanah Ummah
- e. Iklan
- f. Lainnya,sebutkan....

10. Menurut Bapak/Ibu apakah keberadaan BPRS Amanah Ummah berperan dalam usaha masyarakat sekitar ?

- a. Ya (*lanjut ke no 11*)
- b. Tidak (*lanjut ke no12*)

11. Apa saja peranan BPRS terhadap usaha masyarakat sekitar ?

No	Peranan BPRS	Ya	Tidak
1	Memberikan pembiayaan untuk modal usaha		
2	Membantu mengembangkan usaha		
3	Membantu memasarkan/mendistribusikan hasil produk		

12. Apa saja peranan BPRS Amanah Ummah dalam proses produksi usaha Bapak/Ibu?

No	Peranan BPRS	Ya	Tidak	Ket
1	Penyuluhan Penyakit Hama Tanaman /Penyakit Kesehatan Hewan			
2	Pelatihan Proses Budidaya			
3	Pendampingan Proses Produksi			

13. Apa saja peranan BPRS Amanah Ummah terhadap pengembangan usaha Bapak/Ibu ?

No	Peranan BPRS	Ya	Tidak	Ket
1	Memberi informasi harga			
2	Memberi informasi tentang konsumen			
3	Memberi informasi tentang daerah/tempat yang berpotensi untuk pemasaran produk			
4	Membantu mendistribusikan produk ke konsumen atau pasar			
5	Membantu proses sertifikasi produk			
6	Penyuluhan mengenai tataniaga			



Lampiran 2 Kuesioner BPRS Amanah Ummah



INSTITUT PERTANIAN BOGOR
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN
Jl. Kamper Wing 5 Level 5 Kampus IPB Dramaga Bogor 16680
Telepon (0251) 421 762, (0251) 621 834, Fax (0251) 421 762

KUESIONER BPRS AMANAH UMMAH

Tanggal wawancara :
 No. Responden :
 Nama :
 Alamat :

Kuesioner ini digunakan sebagai bahan skripsi mengenai “Peran BPRS Amanah Ummah Terhadap Pengembangan Usaha Sektor Pertanian”. Saya mohon partisipasi saudara untuk mengisi kuisisioner ini dengan teliti dan lengkap sehingga dapat menjadi data yang objektif. Informasi yang saudara berikan akan dijamin kerahasiaannya, tidak untuk dipublikasikan dan tidak digunakan untuk kepentingan politis. Atas perhatian dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih

a. Nama :
 b. Jenis Kelamin : L / P
 c. Umur :
 d. No Telp/HP :
 e. Alamat :
 f. Jabatan :

B. BPRS Amanah Ummah

1. Bagaimana sejarah BPRS Amanah Ummah ?
2. Bagaimana struktur organisasi di BPRS Amanah Ummah ?
3. Berapa banyak produk perbankan yang dimiliki BPRS Amanah Ummah ?
4. Bagaimana perkembangan BPRS Amanah Ummah sejak berdiri sampai saat ini ?
5. Apakah ada target pertumbuhan bisnis untuk tahun 2014 ?
6. Untuk tahun-tahun sebelumnya ada atau tidak target dari BPRS Amanah Ummah yang tidak tercapai? Jika ada, target apa saja yang belum tercapai?

C. Strengths

1. Berapa total modal yang dimiliki oleh BPRS Amanah Ummah untuk tahun 2014 ?
2. Untuk usaha pembiayaan sendiri, berapa persen dari total modal yang tersedia (untuk tahun 2014) ?
 Rp_____

Sedikit lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan dilokasi BPRS dan sekitarnya	
Daerah memiliki potensi untuk berkembang perekonomiannya	
Potensi alam dan budaya yang mendukung masyarakat untuk berwirausaha bidang pertanian	

D. Weaknesses

10. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan pembiayaan ?

11. Penilaian apa saja yang diterapkan untuk menentukan layak tidaknya mendapatkan pembiayaan sektor pertanian ?

12. Dalam pengajuan pembiayaan apakah diterapkan persyaratan 5C (*character, capacity, capital, condition of economy and collateral*) dalam penilaian untuk mendapatkan pembiayaan pertanian?

13. Bagaimana kriteria usaha sektor pertanian yang layak mendapatkan pembiayaan pertanian ?

14. Adakah perbedaan dalam pembiayaan usahatani dengan pembiayaan sektor lainnya ?

Perbedaan	Ya	Tidak	Keterangan
Suku bunga			
Besar pembiayaan			
Persyaratan pengajuan			
Besar cicilan			
Jangka waktu pembiayaan			

15. Dalam sistem yang digunakan oleh BPRS Amanah Ummah, apakah masing-masing sektor pembiayaan memiliki alokasi dana pembiayaan tersendiri ?

a. Ya

Pertanian	Perdagangan	Jasa	Industri	Lain-lain

b. Tidak

16. Adakah kemungkinan untuk menambah anggaran untuk pembiayaan pertanian meski sudah ditetapkan di awal?

E. Opportunities

17. Sejak kapan BPRS Amanah Ummah menyediakan pembiayaan usaha sektor pertanian ?

18. Kegiatan pembiayaan usaha sektor pertanian ini dilaksanakan oleh BPRS Amanah Ummah karena melihat potensi pertanian di wilayah Bogor yang cukup bagus dan memungkinkan berkembang ataukah karena ada kebijakan dari pemerintah mengenai pembiayaan usaha sektor pertanian ?

19. Adakah alasan lain terkait pengadaan kegiatan pembiayaan usaha sektor pertanian ini ?
i. Ya ,yaitu _____
ii. Tidak
20. Adakah dukungan dari pemerintah daerah setempat terkait pembiayaan usaha sektor pertanian ini ?
i. Ya, berupa _____
ii. Tidak
21. Nasabah pembiayaan sektor pertanian apakah mengalami peningkatan jumlah dari tahun ke tahun ?

22. Berapa jumlah nasabah pembiayaan sektor pertanian pada tahun 2014 ?
_____ orang

F. Threats

23. Dengan kondisi cuaca di wilayah Bogor yang tak menentu sehingga memungkinkan terjadinya kegagalan panen apakah hal tersebut menjadi ancaman kegagalan pada pembiayaan pertanian?

24. Selain faktor cuaca dan gagal panen, apakah fluktuasi harga komoditi pertanian menjadi ancaman tersendiri terhadap pembiayaan sektor pertanian ?

25. Apakah ketiga faktor (cuaca , gagal panen dan fluktuasi harga komoditi pertanian) membuat pihak Anda (BPRS Amanah Ummah) berpikir untuk mempertimbangkan mengenai usaha pembiayaan sektor pertanian ?

26. Jika nasabah pembiayaan sektor petanian mengalami masalah terkait usahanya apakah berpengaruh terhadap pembiayaan yang diberikan kepada mereka ?
i. Ya, berpengaruh kepada _____
ii. Tidak
27. Bagaimana cara Anda mengatasi nasabah yang bermasalah agar meminimalkan kerugian yang dialami oleh BPRS ?

28. Menurut Anda, apakah sistem pembiayaan sektor pertanian yang sekarang dilaksanakan sudah tepat dalam menanggapi semua kegiatan pembiayaan sektor pertanian ? dalam sistem tersebut masih adakah yang sekiranya perlu diperbaiki ?

29. Dengan banyaknya lembaga keuangan yang ada dan juga memberikan pembiayaan usaha sektor pertanian, bagaimana pihak BPRS Amanah Ummah menyikapi hal ini ?

30. Apakah dengan makin banyaknya lembaga keuangan yang memberi pembiayaan sektor pertanian membuat nasabah pembiayaan BPRS Amanah Ummah berkurang ?

31. Dengan sistem yang dilaksanakan saat ini, apakah pihak Anda masih optimis dalam persaingan yang terjadi dan masih optimis bisa mendapatkan nasabah ?

2011	2108
2012	2469
2013	2714

Al-Hikmah milik IPB University

IPB University



Lampiran 6 Tabel Jumlah Nominal Usaha Pembiayaan BPRS Amanah Ummah Tahun 2007 - 2013

Tahun	Jumlah Nominal Pembiayaan
2007	24508612000
2008	34074962000
2009	40319379000
2010	47801939000
2011	65866168000
2012	79294901000
2013	96871360000

Lampiran 7 Tabel Jumlah Nominal Pembiayaan Sektor Pertanian BPRS Amanah Ummah Tahun 2007 - 2013

Tahun	Nominal Pembiayaan
2007	610389000
2008	814799000
2009	999556000
2010	414920000
2011	1067397000
2012	1563136000
2013	1772721000

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Sukabumi tanggal 10 Juli 1992 dari pasangan Kusnaedi dan Isah Aisah dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Adik penulis bernama Abdul Haq.

Penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Kota Sukabumi hingga lulus pada 2007, SMA Negeri 1 Sukabumi hingga lulus pada 2010 dan penulis diterima di IPB dengan Mayor Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen melalui jalur USMI.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti magang di BEM Tingkat Persiapan Bersama pada 2010 dan mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa di bidang seni yaitu Lingkung Seni Sunda Gentra Kaheman IPB sejak tahun 2011 dan pernah menjadi Kepala Departemen Komunikasi Internal dan Eksternal di UKM Lingkung Seni Sunda Gentra Kaheman selama dua periode, 2011-2012 dan 2012-2013. Selain itu juga mengikuti kegiatan sebagai panitia maupun peserta baik lingkup UKM, departemen dan institut.